

Maret 2024

Kerusakan Pengerukan

Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan pada proyek pengerukan internasional yang diangsuransikan oleh Pemerintah Belanda



KOLOFON

Laporan ini adalah publikasi kolaboratif oleh:

Both ENDS (Belanda)
EKOMARIN (Indonesia)
Forum Suape (Brazil)
Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan PNE, Filipina)
Save Maldives Campaign (Maladewa)
União Provincial de Camponês (UPC, Mozambik)
WALHI/Kawan Bumi Indonesia-Sulawesi Selatan (Indonesia)

With contributions from:

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO, Belanda)
IUCN NL (Belanda)
Milieudefensie (Friends of the Earth Belanda)



Editor:

Paige Shipman

Layout:

Margo Vlamings

Penerjemahan:

Bahasa Indonesia - Mustaqim Haniru
Bahasa Portugis - Leandro Moura dan Carolina Mayda

Terima kasih khusus kepada:

Qurratul Ain Contractor dan Christa van Oorschot yang telah berkontribusi dalam laporan ini

Kredit Sampul foto:

Kapal Boskalis 'Prince of the Netherlands'. Oleh Kathleen Lei Limayo

Dipublikasikan oleh Both ENDS, Maret 2024.

Both ENDS • Nobelstraat 4 • 3512 EN Utrecht, Belanda
info@bothends.org • +31 85 060 5058

RANGKUMAN

Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan proyek infrastruktur kelautan dan pesisir berskala besar di seluruh dunia. Proyek-proyek tersebut telah menimbulkan malapetaka pada masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Antara tahun 2012 dan 2023, Pemerintah Belanda telah menyediakan asuransi sebesar 8,4 miliar euro kepada perusahaan pengerukan dan pemberi modal untuk melindungi keterlibatan mereka dalam proyek-proyek tersebut. Dukungan dana publik ini diberikan melalui Badan Kredit Ekspor Belanda, Atradius Ducth State Business (Atradius DSB).

Laporan ini menunjukkan bahwa Atradius DSB, melalui dukungannya kepada pengeruk Belanda Boskalis dan Van Oord, dikaitkan dengan dampak sosial, lingkungan, dan HAM yang serius. Berdasarkan penelitian gabungan dengan organisasi masyarakat sipil, laporan ini menganalisa tujuh proyek pengerukan Belanda yang didukung oleh pemerintah Belanda melalui fasilitas kredit ekspor. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan praktik-praktik yang berbeda dengan standar yang berlaku, yang dimulai dari temuan lokal para mitra. Dalam melakukan hal ini, kelemahan mendasar dalam sistem terungkap, termasuk pengusuran masyarakat secara paksa, represi, hilangnya mata pencaharian, dan kerusakan ekosistem. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pengelolaan proyek secara rutin didominasi oleh kepentingan pribadi dan tidak responsif, akuntabel, dan transparan terhadap masyarakat yang terkena dampak. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan di mana kebijakan dan standar – termasuk pelaksanaannya – memerlukan perbaikan.

Meskipun Atradius DSB memiliki kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan internasional (ICSR) dan telah membuat beberapa perbaikan selama bertahun-tahun, baik kebijakan maupun praktiknya masih gagal. Laporan ini menunjukkan bagaimana Badan Kredit Ekspor telah berulang kali gagal dalam mencegah dan memitigasi dampak buruk sektor pengerukan Belanda.

Untuk menjamin koherensi kebijakan, penulis mendesak Pemerintah Belanda untuk menilai kembali kebijakan dan praktiknya dalam mempromosikan dukungan pemerintah terhadap proyek pengerukan yang merusak di luar negeri. Penulis memberikan rekomendasi yang mendesak kepada Pemerintah Belanda untuk memastikan keselarasan yang penuh terkait kebijakan ekspor Belanda dengan komitmennya untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kerangka internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

PESAN-PESAN UTAMA UNTUK PEMBUAT KEBIJAKAN BELANDA:

- Menarik asuransi kredit ekspor pada proyek-proyek yang digambarkan dalam laporan ini yang saat ini sedang berjalan: Proyek LNG Mozambik, Bandara Internasional Manila Baru, dan pelabuhan Gulhifalhu.
- Memastikan keselarasan dengan pedoman OECD, Prinsip Panduan PBB, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kungmin-Montreal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dengan mengambil langkah-langkah kebijakan berikut:
 - Menjamin keterbukaan publik yang tepat waktu terhadap dokumentasi sosial, lingkungan dan HAM yang relevan dari proyek-proyek yang diasuransikan. Mendefinisikan kerahasiaan bisnis dengan cara yang terbatas, hanya pada pengecualian-pengecualian yang didefinisikan dengan baik. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif di seluruh tahapan proyek, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan dan marginal.
 - Meningkatkan kebijakan gender untuk menilai dan mengelola dampak buruk yang khusus terkait dengan gender.
 - Mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi pembela HAM dalam bidang lingkungan hidup terhadap pembalasan.
 - Memastikan bahwa proyek-proyek yang berjalan tidak memberikan dampak buruk terhadap jaminan keamanan masyarakat baik di darat maupun di laut.
 - Menyertakan ketentuan dalam asuransi kredit ekspor yang memungkinkan pencabutan asuransi lebih mudah jika standar sosial, lingkungan, dan HAM tidak terpenuhi.
 - Menolak permintaan dukungan kredit ekspor pada proyek-proyek yang direncanakan akan dilakukan di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk ekosistem dengan integritas ekologi yang tinggi.
 - Menolak permintaan dukungan kredit ekspor pada proyek-proyek yang telah terkait dengan pelanggaran HAM atau perusakan lingkungan secara ilegal.





**NO TO
DREDGING**

DAFTAR ISI

Kolofon ■ 2

Rangkuman ■ 3

Daftar isi ■ 6

Singkatan-Singkatan ■ 7

BAB 1 - Pendahuluan ■ 8

BAB 2 – Sektor pengerukan dan asuransi kredit ekspor ■ 10

2.1 Bisnis Pengerukan ■ 10

2.2 Peran Badan Kredit Ekspor ■ 10

2.3 Kerangka normatif internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan ■ 12

BAB 3 – Secara singkat: Proyek-proyek pengerukan Belanda yang didukung oleh ECA ■ 14

BAB 4 – Dampak sosial, lingkungan dan HAM dari proyek-proyek pengerukan Belanda yang didukung oleh ECA ■ 16

4.1 Komunitas pesisir ■ 16

4.2 Pengusuran secara paksa dan kehilangan mata pencaharian ■ 16

4.3 Ekosistem pesisir dan laut ■ 28

4.4 Kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati ■ 28

Klaim yang tidak terbukti dari biodiversity offset ■ 31

BAB 5 – Mencegah dan memitigasi dampak buruk? Tindakan Atradius DSB, pemerintah Belanda dan para pengeruk ■ 34

5.1 Bobot uji tuntas sosial dan lingkungan yang terbatas ■ 34

5.2 Keterbukaan publik yang tidak memadai mengenai penilaian proyek, rencana mitigasi dan pemantauan ■ 35

5.3 Pengaruh tidak proporsional dari kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan pemantauan ■ 35

5.4 Pengabaian terhadap konflik dan konteks HAM yang lebih luas ■ 36

5.5 Keterlibatan publik yang tidak memadai pada tingkat lokal ■ 37

5.6 Penyimpangan hukum dan korupsi ■ 38

5.7 Perubahan yang tidak memadai pada kebijakan uji tuntas Atradius DSB ■ 38

Argumen yang cacat terhadap dukungan ECA Belanda pada proyek-proyek yang merusak secara sosial dan lingkungan ■ 40

BAB 6 – Kesimpulan dan rekomendasi ■ 41

BAB 7 - Tanggapan dari stakeholder Belanda terhadap laporan ini ■ 43

SINGKATAN-SINGKATAN

- Atradius DSB** - Atradius Dutch State Business, the export credit agency for the Dutch state (Badan Kredit Ekspor untuk Pemerintah Belanda)
- Atradius NV** - private insurance company Atradius NV (Perusahaan asuransi swasta Atradius NV)
- Boskalis** - Royal Boskalis Westminster
- CIPS** - Industrial and Harbour Complex of Suape (Kompleks Industri dan Pelabuhan Suape)
- CPI** - Centre Point of Indonesia
- CSO** - Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)
- ECA** - Export Credit Agency (Badan Kredit Ekspor)
- ECI** - Export Credit Insurance (Asuransi Kredit Ekspor)
- EIA** - Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan)
- ESIA** - Environmental and Social Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
- ESAP** - environmental social action plan (rencana tindakan lingkungan sosial)
- GBF** - Global Biodiversity Framework (Kerangka Keanekaragaman Hayati Global)
- IEA** - International Energy Agency (Badan Energi Internasional)
- ICSR** - International Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Internasional)
- IUCN** - International Union for Conservation of Nature (Serikat Internasional untuk Konservasi Alam)
- Kalikasan PNE** - Kalikasan People's Network for the Environment (Jaringan Masyarakat Kalikasan untuk lingkungan)
- KBA** - Key Biodiversity Area (Kawasan Utama Keanekaragaman Hayati)
- LNG** - Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair)
- MBSDMP** - Manila Bay Sustainable Development Master Plan (Rencana Utama Pembangunan Berkelanjutan Teluk Manila)
- MPA** - Marine Protected Area (Kawasan laut yang dilindungi)
- NCP** - National Contact Point (Titik Kontak Nasional)
- NDA** - Non-Disclosure Agreement (Perjanjian yang bersifat rahasia)
- NGO** - Non-Governmental Organisation (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- NMIA** - New Manila International Airport (Bandara Internasional Manila Baru)
- NNL** - No Net Loss (Tidak Ada Kerugian Bersih)
- OECD** - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
- OECD Guidelines** - OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional)
- PAMALAKAYA-Pilipinas** - National Federation of Small Fisherfolk Organizations of the Philippines (Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil Filipina)
- SDG** - Sustainable Development Goal (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
- UN** - United Nations (Perserikatan Bangsa-bangsa)
- UNGPs** - UN Guiding Principles for Business and Human Rights (Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM)
- UPC** - União Provincial de Camponês

BAB 1

PENDAHULUAN

‘Kami tidak keberatan dengan perusahaan asing yang datang melakukan bisnis dan menghasilkan uang, akan tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Kami ingin melihat perubahan mendasar, dimana perusahaan tidak hanya peduli terhadap keuntungan, tetapi juga masyarakat lokal dan lingkungan.’ Muhammad al Amin, Direktur, WALHI Sulawesi Selatan

Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan proyek infrastruktur kelautan dan pesisir berskala besar di seluruh dunia, meliputi pelabuhan, pembangunan real estate kelas atas dan energi lepas pantai, yang sering dibangun di atas tanah yang direklamasi secara artifisial dari laut dengan pasir yang ditambang dari dasar laut. Meskipun kerap membawa janji ‘pembangunan’, proyek-proyek ini secara rutin telah mendatangkan malapetaka bagi masyarakat pesisir dan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.¹ Dampak-dampak ini meliputi pengusuran masyarakat secara paksa, represi, kehilangan mata pencaharian, kerusakan ekosistem dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, proyek-proyek skala besar ini telah muncul sebagai ancaman besar terhadap Hak Asasi Manusia dan ketangguhan masyarakat yang sudah menanggung beban berat dari perubahan iklim.

Proyek-proyek kontroversial ini telah mendorong pengawasan yang lebih dekat pada sektor pengerukan yang melaksanakan proyek-proyek besar ini, serta konteks peraturan yang lebih luas dimana mereka beroperasi.² Pasar pengerukan internasional merupakan

sebuah industri yang bernilai miliaran dolar yang didominasi oleh segelintir perusahaan-perusahaan multinasional, yang dikenal dengan “big four” yang berbasis di Belanda dan Belgia. Penelitian sebelumnya pada kasus-kasus tertentu telah menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan ini berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, terhadap dampak sosial dan lingkungan yang merugikan melalui operasi bisnis mereka.³

1.1 PERAN BADAN KREDIT EKSPOR BELANDA (ATRADIUS DSB)

Namun demikian, sebuah isu utama yang kurang mendapatkan perhatian adalah hubungan antara proyek-proyek ini dan strategi ekspor negara-negara di mana perusahaan-perusahaan pengerukan berkantor pusat. Pada kasus negara Belanda, Pengeruk yang berasal dari negara ini menerima berbagai dukungan finansial, lembaga, dan diplomasi dari Pemerintah Belanda yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar global mereka. Yang paling signifikan, dan nampaknya kurang diketahui, bentuk dukungan publik yaitu melalui Badan Kredit Ekspor Belanda atau yang dikenal dengan Export Credit Agency (ECA). Melalui badan ini,

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB), Pemerintah Belanda telah menyediakan asuransi senilai miliaran euro kepada perusahaan pengerukan dari Belanda dan pemberi modal mereka. Pengeruk Belanda faktanya merupakan pelanggan terbesar Atradius DSB (lihat data 1).

Belanda menandatangani sejumlah kerangka internasional yang bertujuan mempromosikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Pengeruk dari Belanda yang meminta dukungan dari Atradius DSB harus mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines) dan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGP), sebagaimana diuraikan pada Rencana Aksi Belanda untuk Bisnis dan HAM.⁴ Faktanya, dukungan Belanda terhadap proyek-proyek pengerukan yang kontroversial sering dijustifikasi oleh klaim bahwa dukungan tersebut berkontribusi terhadap penerapan yang lebih ketat dari standar-standar ini, sehingga (seharusnya) menghasilkan situasi yang menguntungkan antara sektor swasta Belanda, masyarakat lokal, dan ekosistem.

Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, narasi keunggulan Belanda ini tidak memiliki dasar dalam realitas lokal dan utamanya berfungsi untuk melegitimasi keterlibatan perusahaan multinasional dari Belanda pada proyek-proyek kontroversial ini. Terlebih lagi, narasi ini telah mengaburkan pengalaman-pengalaman masyarakat yang terkena dampak dari proyek-proyek ini. Jauh dari kata 'dapat diterima' secara sosial dan lingkungan, proyek-proyek ini secara sistematis terkait dengan kerusakan ekosistem, kehilangan mata pencaharian, dan pelanggaran HAM.

1.2 DASAR DAN TUJUAN

Laporan ini merupakan sebuah publikasi kolaboratif oleh: Both ENDS (Belanda), EKOMARIN (Indonesia), Forum Suape (Brazil), Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan PNE, Filipina), Save Maldives Campaign (Maladewa), União Provincial de Camponês (UPC, Mozambik) dan WALHI/Kawan Bumi Indonesia – Sulawesi Selatan (Indonesia), dengan kontribusi dari the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO, Belanda), IUCN-NL (Belanda) dan Milieudefensie (Friends of the Earth Belanda). Laporan ini disusun berdasarkan lebih dari satu dekade penelitian dan advokasi dengan komunitas-komunitas terdampak, yang mencakup tujuh proyek pengerukan Belanda yang didukung oleh ECA di seluruh dunia. Seluruh tujuh proyek ini diklasifikasikan sebagai proyek kategori A oleh Atradius DSB karena memiliki risiko sosial dan lingkungan yang tinggi.

Bertahun-tahun keterlibatan masyarakat sipil terhadap dampak-dampak yang merugikan dari pengerukan Belanda telah dipenuhi dengan janji-janji besar perubahan kebijakan dari pihak Atradius DSB dan perusahaan pengerukan. Namun demikian, perubahan kebijakan

ini tidak lebih dari sebuah kedok, sebagaimana diilustrasikan dengan fakta bahwa beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang paling parah telah terjadi beberapa tahun terakhir.

Laporan ini mencerminkan sebuah perjalanan dari advokasi kasus-perkasus yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang disebutkan di atas dalam upaya untuk menunjukkan dampak-dampak merugikan yang bersifat berulang dan sistemik pada keseluruhan kasus. Dampak-dampak berbahaya dari pengerukan Belanda sebagian besar tidak terlihat oleh masyarakat luas karena transparansi yang buruk dan laporan yang bias dari Atradius DSB, Kementerian Keuangan Belanda, Kementerian Luar Negeri Belanda, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Tujuan dari laporan ini ada dua:

1. Untuk mengungkap proyek-proyek pengerukan yang didukung oleh ECA Belanda dengan memperlihatkan perjuangan dan dampak-dampak yang dihadapi oleh masyarakat dan ekosistem yang terkena dampak sekaligus menunjukkan bagaimana dampak-dampak ini, sebagian, merupakan akibat dari kelalaian pihak Atradius DSB, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pengeruk Belanda.
2. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mendesak untuk menyelaraskan asuransi kredit ekspor Belanda dengan kewajiban internasionalnya terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

- 1 UNEP 2022, Pasir dan Keberlanjutan. <https://www.unep.org/resources/report/sand-and-sustainability-10-strategic-recommendations-avert-crisis>
- 2 Pasir laut: Meletakkan pasir pada agenda keberlanjutan laut. Laporan Aliansi Aksi Risiko dan Ketahanan Laut (ORRAA). https://www.researchgate.net/publication/371541012_Ocean_Sand_Putting_sand_on_the_ocean_sustainability_agenda
- 3 Mengeruk dalam gelap <https://www.bothends.org/en/Whats-new/Publicaties/Dredging-in-the-Dark/>; Report Suape Harbor <https://www.bothends.org/en/Whats-new/Publicaties/Report-Suape-Harbor/>
- 4 Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM. <https://www.government.nl/documents/publications/2022/11/8/national-action-plan-business-and-human-rights>
- 5 Agenda keberlanjutan meletakkan pasir di laut. Laporan Aliansi Aksi Risiko dan Ketahanan Laut (ORRAA). https://www.researchgate.net/publication/371541012_Ocean_Sand_Putting_sand_on_the_ocean_sustainability_agenda
- 6 Pasir laut: Meletakkan pasir pada agenda keberlanjutan laut. Laporan Aliansi Aksi Risiko dan Ketahanan Laut (ORRAA). https://www.researchgate.net/publication/371541012_Ocean_Sand_Putting_sand_on_the_ocean_sustainability_agenda
- 7 Tinjauan Tahunan Boskalis <https://boskalis.com/media/dkthx3dz/boskalis-annual-review-2022.pdf>
- 8 Laporan Tahunan Van Oord tahun 2022. <https://annualreport.vanoord.com/annual-report/introduction/key-figures>
- 9 Siaran pers Boskalis mengenai proyek Teluk Manila. <https://boskalis.com/nl/pers/persberichten-en-bedrijfsnieuws/boskalis-verkrijgt-eur-1-5-miljard-landontwikkelingsproject-voor-de-internationale-luchthaven-van-manilla-in-de-filipijnen>

Temuan-temuan yang ditampilkan dalam laporan ini berdasarkan pada laporan penulis dan komunitas yang terdampak. Oleh karena itu, laporan ini menawarkan penyelidikan yang unik, kolaboratif dan mendalam terhadap pokok permasalahan. Dengan pengecualian kasus Suez di Mesir, penulis masih berhubungan langsung dengan orang-orang yang terkena dampak. Dan jika memungkinkan laporan ini juga memanfaatkan sumber-sumber pendukung seperti penelitian akademis, permintaan kebebasan informasi, media, dan laporan LSM. Atradius DSB, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Belanda, Van Oord, dan Boskalis diminta untuk menanggapi versi draft sebelum publikasi laporan ini. Tanggapan mereka dapat ditemukan dalam Bab 7.

Laporan ini disusun sebagai berikut. Bab 2 membahas bisnis pengerukan dan peran asuransi kredit ekspor, serta kerangka normatif yang relevan dengan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Bab 3 menyediakan gambaran singkat dari tujuh kasus yang dibahas dalam laporan ini. Bab 4 menyediakan gambaran rinci dari berbagai dampak sosial, lingkungan dan HAM yang terkait dengan ketujuh kasus ini. Bab 5 menyediakan gambaran rinci dari peran dan tindakan Atradius DSB, pengeruk Belanda, dan pemerintah lokal terkait dengan ketujuh proyek. Bab 6 menyediakan sebuah kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Bab 7 menampilkan tanggapan dari Atradius DSB, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Belanda, Van Oord, dan Boskalis terhadap temuan-temuan dalam laporan ini.

BAB 2

SEKTOR Pengerukan DAN ASURANSI KREDIT EKSPOR

2.1 BISNIS Pengerukan

Pengerukan mengacu pada ekstraksi pasir dan kerikil, yang dikenal dengan agregat, dari sungai dangkal dan ekosistem laut. Pengerukan dilakukan untuk beberapa tujuan, termasuk pengerukan mineral, juga dikenal dengan penambangan pasir, yang meliputi ekstraksi mineral dengan nilai ekonomi, dan pengerukan modal, yang meliputi pengembangan pekerjaan teknik sipil seperti pelabuhan dan perlindungan pantai.⁵ Reklamasi tanah mengacu pada sebuah aktifitas pengerukan khusus di mana pasir diekstraksi dari satu lokasi dan selanjutnya diangkut dan dibuang ke lokasi lainnya untuk menciptakan lahan baru untuk pembangunan real estate dan/atau infrastruktur.

Sektor pengerukan dikelola dalam pasar terbuka dan tertutup, di mana yang pertama mengacu pada pasar yang terbuka untuk kompetisi internasional dan yang kedua mengacu pada pasar yang dibatasi untuk perusahaan domestik, seperti yang berada di Tiongkok dan Amerika Serikat. Pasar pengerukan terbuka didominasi oleh empat perusahaan multinasional ('the Big Four'), dua diantaranya berbasis di Belanda, Royal Boskalis Westminster dan Royal Van Oord, dan dua lainnya berbasis di Belgia, DEME dan Jan de Nul Group. Penelitian terbaru oleh Jouffray dkk (2023) menemukan bahwa empat perusahaan ini mengendalikan sejumlah 95% dari pasar pengerukan terbuka dan penghasilan mereka terus mengalami peningkatan.⁶ Antara tahun 2021 dan 2022, Penghasilan Boskalis meningkat dari 2,9 miliar euro

hingga 3,5 miliar euro,⁷ sementara penghasilan Van Oord meningkat dari 1,5 miliar euro hingga 2 miliar euro pada periode yang sama.⁸

Basis pelanggan sektor pengerukan terdiri dari pemerintah dan perusahaan swasta, sering bekerja bersama-sama, untuk tujuan mengembangkan infrastruktur pesisir dan laut dalam skala besar. Kontrak dalam pasar pengerukan terbuka biasanya, meskipun tidak selalu, diberikan melalui proses tender publik. Perusahaan-perusahaan bersaing mendapatkan kontrak berdasarkan sejumlah faktor, termasuk harga, ukuran, dan ketersediaan armada dan kapal masing-masing, reputasi dan hubungan mereka dengan pemerintah yang mengadakan kontrak, serta kecepatan dan fleksibilitas mereka dalam melaksanakan proyek. Kadang-kadang perusahaan dari 'the big four' akan bekerja sama dalam suatu proyek, seperti pada kasus Terusan Suez di Mesir dan reklamasi lahan Kota Pluit di Indonesia, keduanya dijelaskan dalam laporan ini.

2.2 PERAN BADAN KREDIT EKSPOR

Proyek-proyek pengerukan biasanya membutuhkan modal besar. Proyek terbesar dari Boskalis – membangun lahan baru untuk bandara baru di Teluk Manila – adalah sebuah proyek yang bernilai 1,5 miliar euro.⁹ Salah satu proyek terbesar Van Oord, sebuah proyek gas alam cair (LNG) di Mozambik, bernilai hampir 1 miliar euro.¹⁰ Kedua proyek ini dibahas secara rinci di bawah ini. Pengeruk dan pemberi dana swasta dapat mengasuransikan diri mereka

terhadap resiko-resiko keuangan yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut, seperti tidak adanya pembayaran dari pihak yang melakukan kontrak, dengan mengajukan asuransi kredit ekspor atau jaminan dari Badan Kredit Ekspor (ECA) yang didukung oleh pemerintah. Dengan melakukan hal ini, ECA memiliki peran penting dalam memastikan kelayakan keuangan dari proyek-proyek pengerukan beresiko tinggi.

Badan Kredit Ekspor Belanda adalah Atradius State Business (Atradius DSB), yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan multinasional Atradius NV, yang berbasis di Spanyol.¹¹ Atradius DSB menawarkan berbagai asuransi dan jaminan untuk eksportir barang modal, kontraktor internasional, bank, dan investor atas nama Pemerintah Belanda, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.¹² Pengeruk dapat mengajukan permohonan asuransi ke Atradius DSB sekaligus melakukan tender untuk sebuah kontrak proyek. Pada kasus di mana proyek memiliki resiko sosial dan

lingkungan yang sangat tinggi (proyek kategori A), Atradius DSB diharuskan untuk mengadakan proses uji tuntas untuk menilai apakah dampak-dampak merugikan dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dianggap "dapat diterima". Ketika penilaian telah dilakukan, Atradius DSB memberikan rekomendasinya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, yang kemudian akan memiliki keputusan akhir mengenai apakah asuransi akan diberikan kepada pemohon.

Melihat dominasi global pengeruk Belanda (bersama dengan Belgia), Pemerintah Belanda – melalui Badan Kredit Ekspornya – merupakan pemain keuangan yang penting dalam konteks pasar pengerukan terbuka. Dengan demikian, Pemerintah Belanda memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek-proyek ini dan definisi dampak sosial dan lingkungan yang "dapat diterima".

Dalam dua belas tahun terakhir (2012-2023) Pemerintah Belanda telah menyediakan asuransi kredit

¹⁰ Siaran pers Van Oord mengenai proyek LNG Mozambik. <https://www.vanoord.com/nl/updates/van-oord-wint-grote-opdracht-voor-ling-project-mozambique/>

¹¹ Laporan ini hanya mencakup proyek-proyek yang didukung oleh Atradius DSB, Badan Kredit Ekspor pemerintah Belanda.

¹² Kontrak Atradius DSB saat ini dengan pemerintah Belanda baru-baru ini dinyatakan melanggar hukum, karena diberikan tanpa melalui proses tender terbuka sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum negara Belanda dan Uni Eropa. Meskipun masalah ini masih dalam penyelidikan oleh Kementerian Keuangan, Atradius DSB telah diizinkan untuk melanjutkan operasinya sebagai ECA Belanda hingga tahun 2027. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/11/27/status-update-comptabele-onrechtmatigheid-ekv>

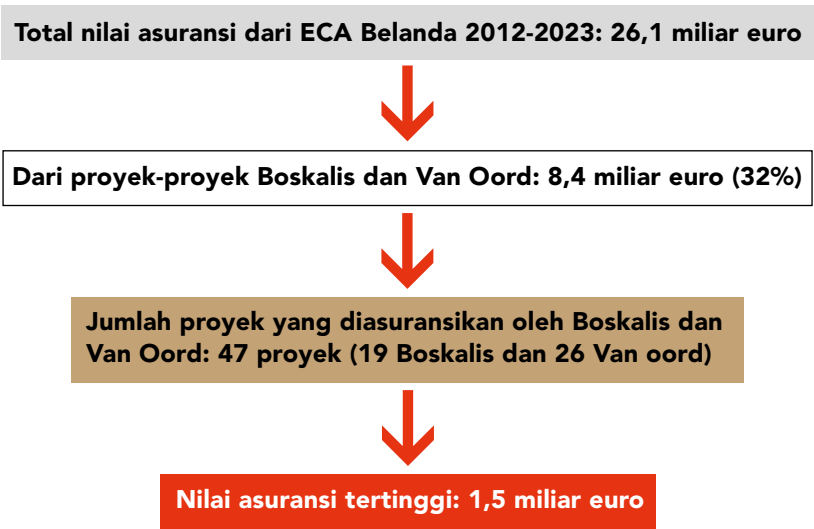
¹³ Berdasarkan ringkasan Atradius DSB: <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/publicaties/afgegeven-polissen.html> and <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/publicatie-a-projecten.html> Most insurances for Boskalis and Van Oord are dredging related projects with high social and environmental risks.

¹⁴ Laporan tahunan Van Oord tahun 2022. <https://annualreport.vanoord.com/annual-report/introduction/key-figures>

¹⁵ Panduan uji tuntas mengenai keterlibatan stakeholder dalam industri ekstraktif. <http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm>

¹⁶ Ekonomi yang adil dan berkelanjutan: Komisi menetapkan aturan bagi perusahaan untuk menghormati HAM dan lingkungan dalam rantai nilai global. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145

DATA 1



eksport senilai 8,4 miliar euro kepada Boskalis dan Van Oord,¹³ 32% dari nilai asuransi Atradius DSB sejumlah 26,1 miliar euro untuk periode ini. Boskalis menerima dukungan Badan Kredit Ekspor sejumlah 19 proyek, Van Oord sejumlah 26 proyek. Proyek yang terbesar adalah pembangunan sebuah bandara di Teluk Manila, yang bernilai 1,5 miliar.¹⁴

2.3 KERANGKA NORMATIF INTERNASIONAL UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB, KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proyek-proyek infrastruktur pesisir dan kelautan berskala besar dapat memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat dan ekosistem dan sering terkait dengan pelanggaran HAM, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Bagian berikut menguraikan tiga kerangka normatif internasional yang diadopsi oleh Belanda yang memiliki relevansi khusus terhadap sektor pengerukan dan asuransi kredit ekspor.

Hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan

Kerangka normatif bisnis internasional mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab didasarkan pada dua instrumen otoritatif yang didukung oleh pemerintah: Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines) dan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGP). Standar-standar ini mencakup topik-topik yang luas, dari hak asasi manusia dan pekerja serta lingkungan hingga keterbukaan, iklim, penyuaian dan perpajakan, dan meliputi panduan khusus pada topik-topik penting, termasuk keterlibatan stakeholder yang bermakna. Hal ini didasarkan pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Konvensi Inti ILO, dan perjanjian internasional lainnya terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Belanda, sebagai anggota OECD dan yang menandatangani Deklarasi Investasi OECD, telah membuat komitmen yang terikat secara hukum untuk melaksanakan pedoman OECD.

Pedoman OECD dan UNGP memperjelas bahwa perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan pengerukan multinasional seperti Boskalis dan Van Oord, serta pemberi modal seperti Atradius DSB, memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari dampak yang merugikan. Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan proses enam langkah yang disebut "uji tuntas" untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Hal ini berlaku tidak hanya pada dampak yang mereka timbulkan sendiri atau kontribusi mereka, tetapi juga dampak yang diperkirakan disebabkan oleh bisnis atau pemerintah lainnya yang terkait dengan hubungan bisnis mereka. Sayangnya, pelaksanaan standar normatif ini – baik di Belanda maupun di seluruh dunia – tidak merata, dan sebagian besar bergantung pada upaya sukarela dari perusahaan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, beberapa pemerintah telah mengadopsi, atau sedang mengembangkan, undang-undang wajib hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan hidup, termasuk Uni Eropa¹⁶ dan Belanda.¹⁷

Selain diharapkan untuk mematuhi pedoman OECD, Atradius DSB – sebagai badan kredit ekspor – juga diwajibkan secara hukum untuk mengikuti kerangka 'pendekatan umum' OECD, yang menetapkan persyaratan uji tuntas khusus untuk ECA.¹⁸ Meskipun ada beberapa perbedaan,¹⁹ kepatuhan terhadap keduanya, Pedoman OECD dan

Pendekatan Umum adalah hal yang sejalan, dan Pemerintah Belanda mengharapkan Atradius DSB untuk mematuhi keduanya.

Atradius DSB, Boskalis, dan Van Oord semuanya memiliki kebijakan keberlanjutan sosial dan lingkungan secara tertulis.²⁰ Akan tetapi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam laporan ini dan banyak laporan lainnya, regulasi mandiri oleh perusahaan telah gagal untuk mencegah dan mengatasi dampak-dampak merugikan dari bisnis terkait hak asasi manusia, lingkungan dan iklim.

Keanekaragaman hayati

Update tahun 2023 terkait pedoman OECD menambahkan Bahasa baru pada bahaya terhadap keanekaragaman hayati sebagai dampak buruk khusus yang diharapkan dapat dicegah oleh perusahaan.²¹ Selain itu, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal atau the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) diadopsi pada bulan Desember 2022 oleh 196 negara, termasuk Belanda. Kerangka ini terdiri dari 23 target di tahun 2030 dan empat tujuan di tahun 2050, yang berfungsi sebagai jalan menuju sebuah 'visi global tentang dunia yang hidup selaras dengan alam di tahun 2050.'²² Target-target ini berhubungan dengan sejumlah tema yang sangat relevan dengan proyek-proyek pengerukan yang didukung oleh ECA Belanda, dan keterlibatan Pemerintah Belanda dan perusahaan pengerukan Belanda:

•**Ketangguhan manusia dan alam**
GBF bertujuan untuk mengurangi hilangnya wilayah yang memiliki kepentingan keanekaragaman hayati yang tinggi dan integritas ekosistem hingga hampir nol pada tahun 2030. GBF juga bertujuan untuk menghentikan kepunahan yang disebabkan oleh manusia terkait spesies yang terancam melalui langkah pemulihan dan konservasi. Pentingnya, GBF mengatasi saling ketergantungan

antara manusia dan keanekaragaman hayati dengan menyerukan restorasi, pemeliharaan, dan peningkatan kontribusi alam terhadap manusia melalui jasa dan fungsi ekosistem, termasuk perlindungan dari bahaya dan bencana alam.

• **Pengambilan keputusan yang inklusif dan keadilan**

GBF menyerukan agar keanekaragaman hayati diintegrasikan di dalam dan seluruh tingkat pemerintahan dan sektor, khususnya yang memiliki dampak signifikan pada keanekaragaman hayati. GBF menaruh penekanan yang kuat pada partisipasi yang inklusif, adil dan responsif terhadap gender dan representasi dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, serta akses pada keadilan dan informasi bagi penduduk asli dan komunitas lokal. GBF secara khusus menyebutkan hak-hak penduduk asli dan masyarakat lokal terhadap tanah dan wilayah mereka serta kebutuhan untuk memastikan perlindungan penuh terhadap pembela hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup.

• **Bisnis dan Insentif**

GBF menyerukan langkah-langkah hukum, administratif dan kebijakan untuk memastikan perusahaan-perusahaan transnasional yang besar dan lembaga keuangan mengawasi, menilai, dan secara transparan mengungkapkan dampak-dampak mereka pada keanekaragaman hayati di seluruh operasi, portofolio, dan rantai pasokan dan nilai mereka. Lebih lanjut, GBF menekankan peran insentif (negara) pada hilangnya keanekaragaman hayati, dengan menyerukan pengurangan global tahunan atas insentif berbahaya sejumlah setidaknya 500 miliar dolar per tahun.

Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2015, Belanda dan 192 anggota Majelis Umum PBB lainnya mengadopsi agenda pembangunan tahun 2030, *Transformasi dunia kita*:

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini meliputi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan 169 target yang berhubungan serta 232 indikator yang didefinisikan sebagai 'terpadu dan tidak dapat dipisahkan'. SDGs sejak saat itu berfungsi sebagai agenda otoritatif global untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup sejumlah isu yang relevan dengan proyek-proyek pengerukan yang didukung oleh ECA, termasuk tapi tidak terbatas pada:

• **Perlindungan kelompok miskin dan rentan**

Kerangka SDG menempatkan penekanan khusus terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Contohnya, kerangka ini menyerukan kebijakan-kebijakan yang diperkuat dan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan terhadap dukungan kesetaraan gender, serta hak-hak kepemilikan (tanah) yang terjamin untuk masyarakat miskin dan rentan.

• **Perlindungan ekosistem laut dan mata pencaharian**

Kerangka SDG menekankan pentingnya ekosistem laut dan penghidupan laut dengan menyerukan perlindungan atas keduanya. Ia membuat referensi khusus terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak nelayan kecil atas sumber daya laut.

• **Pengambilan kebijakan partisipatif dan koherensi kebijakan**

Kerangka SDG menyertakan sejumlah tujuan dan target yang berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan responsif dan bertanggung jawab. Contohnya, kerangka ini secara eksplisit menyebutkan perlunya lembaga yang transparan, dan pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif pada semua tingkat, serta akses publik terhadap informasi. Kerangka SDG juga menyertakan sebuah target khusus pada isu koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

17 Ekonomi yang adil dan berkelanjutan: Komisi menetapkan aturan bagi perusahaan untuk menghormati HAM dan lingkungan dalam rantai nilai global. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/bevorderen-internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen>

18 OECD. "Pendekatan Umum" <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/280/280.en.pdf>

19 Lihat, sebagai contoh: Both ENDS. Pendekatan Umum vs Pedoman OECD. https://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/1160609_Common_Approaches_vs_OECD_Guidelines_logo_.pdf

20 Atradius DSB. CSR Internasional. <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/mvo.html>; Boskalis. Responsible business. <https://boskalis.com/sustainability/responsible-business>; Van Oord. Sustainability. <https://www.vanoord.com/en/sustainability/>

21 Pembaruan Pedoman OECD tahun 2023. <https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm>

22 Konvensi Keanekaragaman Haya. <https://www.cbd.int/gbf/>

23 Kawasan penangkapan ikan dan pengetahuan ekologi tradisional: Studi kasus perikanan tradisional di Muara Laguna Patos (Brazil). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X07000735>

24 Tempat garam tradisional menampung konsentrasi besar burung pantai yang melewati musim dingin di Asia Tenggara. https://www.academia.edu/7330795/Traditional_salt_pans_hold_major_concentrations_of_overwintering_shorebirds_in_Southeast_Asia

25 FAO 2022. Tahun Internasional Perikanan Rakyat dan Budidaya Perairan. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc5034en>

BAB 3

SECARA SINGKAT: PROYEK-PROYEK Pengerukan BELANDA YANG DIDUKUNG OLEH ECA



PERLUASAN PELABUHAN, SUAPE, BRAZIL

Perusahaan pengerukan: Van Oord
Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €110 juta

Pada tahun 2011 dan 2012, Van Oord diberikan dua asuransi (€8,7 juta dan €1,5 juta) untuk perluasan Suape Industrial Port Complex, di negara bagian Pernambuco, Brazil, yang dianggap sebagai salah satu proyek pengembangan ekonomi terbesar di Brazil. Proyek ini dikontrak oleh Kompleks Industri dan Pelabuhan Suape (CIPS) dan meliputi pengerukan: 1) Alur masuk dan 2) cekungan pelabuhan galangan kapal yang baru untuk sektor minyak lepas pantai. Proyek ini menyebabkan pengusuran paksa masyarakat dari pulau Tatuoco terdekat, serta kerusakan 45 hektar hutan bakau pesisir dan terumbu karang, yang banyak mendukung mata pencaharian perekonomian perikanan lokal.

PERLUASAN TERUSAN SUEZ, MESIR

Perusahaan pengerukan: Boskalis & Van Oord
Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €515 juta

Pada tahun 2015, Boskalis dan Van Oord diberikan asuransi untuk perluasan jalur air Suez melalui pengembangan kanal pelayaran tambahan dan perluasan dari kanal yang sudah ada. Proyek ini dikontrak oleh kedua perusahaan, bersama dengan pengeruk dari Belgia dan Abu Dhabi, oleh pemerintah Mesir. Proyek ini menyebabkan pengusuran 200 juta meter kubik agregat selama periode sembilan bulan, menggusur 2000 orang (sekitar 500 keluarga), dan meningkatkan risiko kehidupan laut di Laut Mediterania karena spesies invasif.

CENTRE POINT OF INDONESIA, MAKASSAR

Perusahaan pengerukan: Boskalis Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €63 juta

Pada tahun 2017, Boskalis diberikan asuransi untuk pengembangan lima pulau buatan seluas 157 hektar di lepas pantai Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau-pulau ini berbentuk Garuda, yang merupakan simbol nasional Indonesia. Proyek ini dikontrak oleh perusahaan Indonesia Ciputra Group, yang bertujuan mengembangkan real estate perumahan dan komersial kelas atas. Pulau-pulau berbentuk simbolis ini dikembangkan dengan menggusur 43 keluarga dan menghancurkan ekologi pesisir yang bernilai dan perekonomian lokal.

REKLAMASI KOTA PLUIT, TELUK JAKARTA, INDONESIA

Perusahaan Pengerukan: Boskalis Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €209 juta

Pada tahun 2015, Boskalis diberikan asuransi untuk pengembangan 160 hektar pulau buatan di Teluk Jakarta, Indonesia, bertujuan untuk pengembangan real estate perumahan kelas atas. Proyek ini, yang dikontrak oleh perusahaan Indonesia PT Muara Wisesa Samudra, mendapat penolakan keras dari para nelayan yang mata pencahariannya terkena dampak. Sudah hampir satu dekade, reklamasi tanah saat ini masih berupa penimbunan pasir yang mengumpulkan sampah di Teluk Jakarta.

BANDARA INTERNASIONAL MANILA BARU (NMIA), MANILA, FILIPINA

Perusahaan pengerukan: Boskalis Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €1.500 juta

Pada tahun 2022, Boskalis diberikan asuransi untuk pembuatan reklamasi tanah besar-besaran seluas 1.700 hektar untuk pengembangan Bandara Internasional yang baru, di wilayah pesisir provinsi Bulacan di Teluk Manila. Proyek ini dikontrak oleh Boskalis oleh perusahaan San Miguel Corporation, yang berbasis di Filipina. Proyek ini terkait dengan penggusuran paksa ratusan keluarga, kehilangan mata pencaharian untuk puluhan ribu nelayan, dan kerusakan situs keanekaragaman hayati utama meliputi hutan bakau, dataran lumpur, pantai berpasir, terumbu karang, dan padang lamun.

PENGEMBANGAN PELABUHAN GULHIFALHU, MALADEWA

Perusahaan pengerukan: Boskalis Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €126 juta

Pada tahun 2023, Boskalis diberikan asuransi untuk reklamasi tanah seluas 192 hektar dan proyek pengembangan pelabuhan di Laguna Gulhifalhu, Maladewa. Proyek ini dikontrak oleh pemerintah Maladewa dan yang kedua dari pengembangan dua tahap yang diberikan kepada Boskalis yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas laut. Proyek ini diperkirakan akan mendatangkan malapetaka di laguna bagian dalam, terumbu karang, dan kawasan laut yang dilindungi, serta sektor pariwisata lokal dan industri perikanan yang bergantung pada ekosistem laut ini.

LNG MOZAMBIK, CABO DELGADO

Perusahaan Pengerukan: Van Oord Nilai asuransi kredit ekspor Belanda: €970 juta

Pada tahun 2021, Van Oord diberikan asuransi untuk pengembangan infrastruktur LNG bawah laut dekat pantai di provinsi Cabo Delgado, Mozambik Utara. Proyek ini dikontrak oleh TotalEnergies dan merupakan bagian dari pengembangan gas fosil yang kontroversial (di dalam dan luar pantai) yang dikaitkan dengan pemberontakan dengan kekerasan di Mozambik Utara, yang menggusur satu juta orang, hingga menyebabkan kematian ribuan orang, penyerangan terhadap jurnalis dan pembela hak asasi manusia, dan meningkatnya kekerasan gender. Pengembangan gas secara langsung telah mengakibatkan 600 keluarga mengungsi secara paksa dan pekerjaan dekat pantai diperkirakan akan berdampak buruk pada ekosistem laut dan pesisir serta mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem tersebut.

BAB 4

DAMPAK SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN HAM DARI PROYEK-PROYEK Pengerukan BELANDA YANG DIDUKUNG OLEH ECA

Hak-hak, kesehatan, dan kesejahteraan komunitas pesisir – termasuk praktik budaya dan mata pencaharian mereka – berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan ekologi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, dampak sosial ekonomi dari pengerukan sejalan dengan dampak lingkungan. Dalam bab ini, kami menggambarkan dampak buruk proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan laut terhadap masyarakat lokal yang dibangun oleh Boskalis dan/atau Van Oord, dengan dukungan dana publik dari Badan Kredit Ekspor Belanda, Atradius.

4.1 KOMUNITAS PESISIR

Pesisir adalah lingkungan yang kompleks dan rumit yang mendukung kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, termasuk komunitas nelayan kecil dan pengumpul, serta petani dan pembuat garam, yang mata pencahariannya erat kaitannya dengan kesehatan ekologi dan akses pada area pesisir. Mereka adalah penjaga pengetahuan ekologi tradisional, yang sering diwariskan dari generasi ke generasi.²³ Pengetahuan mendalam mereka tentang kondisi ekologi situs khusus, dipadukan dengan penangkapan ikan dan praktik budidaya berskala kecil dan relatif berkelanjutan, pengetahuan teknik pengawetan ikan berenergi rendah, dan fokus utama melayani pasar lokal memungkinkan nelayan dan petani pria dan wanita untuk mengambil manfaat dari pesisir dengan dampak yang minimal. Petani pesisir mengolah lahan selaras dengan fluktuasi air musiman dan tingkat

salinitas sepanjang pantai, sedangkan pembuat garam memanfaatkan lahan basah pesisir secara bijak dengan merekayasa ladang garam yang juga menjadi tempat mencari makan bagi burung-burung yang bermigrasi.²⁴

Di banyak belahan dunia, sebagaimana tercermin dalam studi kasus yang dijelaskan disini, praktik penangkapan ikan tradisional masih bertahan meskipun adanya persaingan yang meningkat dari metode penangkapan ikan berskala besar dan industri, yang tidak ramah lingkungan. Meskipun sektor penangkapan ikan tradisional berkontribusi hanya 40% dari produksi ikan global, sektor ini mempekerjakan 90% dari seluruh pekerja yang terlibat dalam sektor penangkapan ikan, 95% diantaranya beroperasi di negara bagian selatan, yang memiliki populasi hingga 60 juta orang, di mana sekitar 45 juta orang diantaranya adalah perempuan.²⁵ Perempuan memainkan peran penting dalam perekonomian nelayan, tidak hanya menangkap atau mengumpulkan ikan, tetapi juga membersihkan, menjual, mengawetkan dan memasak ikan. Penangkapan ikan tradisional juga mendukung mata pencaharian khusus lainnya, seperti pembuatan perahu dan perbaikan jaring.

4.2 PENGUSURAN SECARA PAKSA DAN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN

Pada bulan Agustus 2014, Presiden Mesir mengumumkan rencana untuk menambah jalur pelayaran tambahan ke Terusan Suez, dengan kecepatan

yang memecahkan rekor yaitu sembilan bulan. Kontrak proyek ini diberikan kepada Boskalis, Van Oord, dan pengeruk dari Belgia dan Abu Dabi. Hanya dua bulan kemudian, pada bulan Oktober, dilaporkan bahwa dua kota dengan total 1.500 rumah telah dihancurkan dan 500 keluarga diperintahkan untuk pergi oleh tentara Mesir. Keluarga-keluarga ini digusur dari rumah mereka tanpa kompensasi.²⁶

Kecepatan kilat yang menjungkirbalikkan kehidupan keluarga-keluarga Mesir adalah hal yang tidak biasa, tetapi perpindahan mereka secara tidak sukarela adalah bukan hal yang tidak biasa. Salah satu dari dampak yang paling merugikan dari proyek infrastruktur pesisir dan laut berskala besar adalah perpindahan secara tidak sukarela dan penggusuran paksa komunitas pesisir, dan hilangnya batasan akses pada kawasan pesisir. Proyek-proyek ini seringkali berlokasi di atau sekitar wilayah pesisir, area yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh anggota komunitas dan memiliki berbagai fungsi penting dalam komunitas pesisir dan nelayan, meliputi ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan rekreasi. Wilayah pesisir diatur oleh hak-hak adat dan struktur masyarakat, yang sering kali tidak terdokumentasikan. Pada banyak kasus, negara gagal mengakui wilayah ini, yang menjadikan masyarakat rentan terhadap penggusuran tanpa adanya kompensasi. Selain itu, pada konteks marginalisasi sosio-ekonomi historis komunitas pesisir tradisional, hambatan terhadap upaya hukum sangat besar. Di beberapa kasus yang dijelaskan dalam laporan ini, pasukan militer dan paramiliter negara digunakan untuk secara paksa, dan terkadang secara kejam, menggusur masyarakat dengan sedikit atau tanpa kompensasi. Tidak adanya konsultasi publik atau mekanisme ganti rugi, serta represi atas perbedaan

‘Selama 2 tahun, kami telah menderita dari dampak pengerukan. Selain mengurangi hasil tangkapan (ikan) kami, hal ini juga menyebabkan erosi pasir di pantai, hingga menyisakan sedikit ruang untuk memarkir perahu kami.’ Nelayan dari Cavite, Teluk Filipi

pendapat, merupakan tema yang berulang dalam proyek-proyek pengerukan ini.

Klaim tentang pengembangan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja telah dibuat mengenai seluruh proyek yang dibahas dalam laporan ini. Akan tetapi untuk masyarakat pesisir yang terlantar, proyek-proyek tersebut secara konsisten menyebabkan kehilangan mata pencaharian mereka dan gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan alternatif yang bermartabat. Kerusakan ekologi pesisir yang diakibatkan oleh proses pengerukan yang merusak, pembuangan pasir, dan konstruksi telah berdampak pada kemampuan ekosistem ini untuk mendukung penghidupan orang-orang yang mendapatkan manfaat darinya. Hal ini menunjukkan dampak lingkungan jangka panjang, seringkali tidak dapat diubah, yang pada akhirnya menyebabkan dampak ekonomi yang parah. Di bawah ini kami menguraikan hilangnya mata pencaharian yang diakibatkan oleh proyek-proyek pengerukan yang diasuransikan oleh ECA Belanda, serta represi dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk pembangunan **New Manila International Airport (NMIA)** di Filipina, lahan seluas 1.700 ha saat ini sedang direklamasi oleh Boskalis di lahan basah yang merupakan tempat yang ditinggali oleh komunitas Nelayan hingga

saat ini, selama beberapa generasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh organisasi HAM Internasional Global Witness, sekitar 700 keluarga nelayan telah dipindahkan secara paksa hingga saat ini, tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu mengenai pembangunan bandara.²⁷ Beberapa dari mereka bahkan dipaksa untuk menghancurkan rumah mereka untuk dijadikan jalan menuju bandara.²⁸ Dari jumlah tersebut, hanya setengah yang menerima kompensasi dalam jumlah tertentu, biasanya berupa uang tunai, yang jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi biaya pembelian rumah atau lahan baru. Keluarga-keluarga tersebut melaporkan adanya intimidasi oleh pasukan bersenjata yang dikerahkan di desa mereka dan dipaksa untuk menerima kompensasi uang tunai. Dari 700 keluarga, hanya 6 diantaranya yang menerima rumah pengganti, dan, sebagai imbalannya, diharuskan untuk menandatangani perjanjian yang melarang mereka berbicara menentang proyek tersebut atau pemiliknya, San Miguel Corporation. Penggusuran ini berlanjut selama puncak pandemi COVID-19, meskipun Departemen Interior dan Pemerintah Lokal di Filipina telah mengeluarkan sebuah memo yang menyerukan penghentian pembakaran karena krisis kesehatan.²⁹

Pembangunan bandara memiliki dampak yang merusak terhadap penghidupan dan perekonomian nelayan di Bulacan. Beberapa tempat

²⁶ Ribuan warga Mesir digusur tanpa kompensasi untuk proyek Suez. The Guardian - Cairo. <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/03/egyptians-evicted-without-compensation-suez-canal-project>

²⁷ Global Witness. Risiko Landasan Pacu. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/holding-corporates-account/runaway-risk/>

²⁸ Aktivist lingkungan hidup mempertanyakan dorongan pembangunan bandara Bulacan selama pandemi. <https://www.rappler.com/moveph/advocates-question-push-bulacan-airport-amid-coronavirus-pandemic/>

²⁹ Airport City menggusur para nelayan di Bulacan. <https://www.rappler.com/environment/airport-city-displaces-bulacan-fisherfolk/>

³⁰ Reklamasi menghambat pengembangan sektor-sektor marginal bagi komunitas pesisir sepanjang Teluk Manila. Manila Today. <https://manilatoday.net/reclamation-hinders-genuine-development-for-marginalized-sectors-in-coastal-communities-along-manila-bay/>

³¹ Global Witness. Berdiri kokoh. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists-standing-firm/>

³² Kelompok ilmuwan mengutuk penahanan dan pelecehan terhadap nelayan di Bulacan, meminta penyelidikan oleh CHR dan DENR. <https://aghamsftp.wordpress.com/2021/11/04/scientist-group-condemns-detention-and-harassment-of-fisherfolk-in-bulacan-seeks-probe-by-chr-and-denr/>

³³ Aljazeera. ‘kami akan memotong lidahmu’: Aktivist Filipina menceritakan pengalaman penculikan yang dialami. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/19/we-will-cut-out-your-tongue-filipino-activists-recount-military-kidnap>

penangkapan ikan di sekitar Bulacan, yang dulunya kaya akan ikan sarden, makarel, ikan mulut kecil, dan ikan teri,³⁰ telah dihancurkan oleh pengerukan, sedangkan akses pada wilayah-wilayah lainnya telah ditutup karena pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Dampak-dampak terhadap mata pencaharian ini juga dirasakan jauh dari lokasi reklamasi di Bulacan, terutama di provinsi pesisir Cavite, di mana penambangan pasir dekat pantai untuk reklamasi bandara telah menghancurkan perekonomian perikanan lokal. Menurut Federasi Nasional Organisasi-Organisasi Nelayan Kecil Filipina (PAMALAKAYA-Filipina), mata pencaharian beberapa dari 20.000 nelayan kecil telah terancam akibat proyek tersebut. Seperti yang sering terjadi, dampak terhadap perempuan sangat berbahaya, karena mereka memainkan peranan penting dalam pengolahan dan persiapan ikan untuk dijual, dan merekalah yang menanggung beban tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarga mereka.

Proyek bandara Teluk Manila telah ditentang keras oleh komunitas dan kelompok lingkungan hidup dan HAM, dengan risiko pribadi yang besar: Filipina dikenal sebagai salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia untuk pembela lingkungan hidup.³¹ Masyarakat di Bulacan telah mengalami berbagai bentuk pelecehan dan penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah proyek.³² Pada tahun 2023 dua sukarelawan dari kelompok Bulacan AKAP Selat Manila, keduanya perempuan pembela lingkungan dan HAM, bersaksi diculik secara kejam oleh aparat keamanan setelah mereka dilaporkan hilang selama beberapa minggu. Kasus ini menjadi berita utama internasional dan dianggap secara luas terkait dengan upaya mereka bersama dengan komunitas terdampak untuk menolak reklamasi tanah.³³

‘Antara Desember dan Maret, kami akan menangkap udang putih untuk dijual di pasar. Sebelum penambangan dari Boskalis, kami bisa menghasilkan Rp700.000 per hari. Selama penambangan, jumlah ini berkurang menjadi Rp70.000 per hari.’

Nelayan di sepanjang pantai Takalar Sulawesi Selatan

HEADLINE

Op de Filippijnen is Boskalis een scheldwoord geworden

‘Boskalis telah menjadi sebuah kata umpatan di Filipina’.
Berita utama di koran Belanda NRC, 3 Februari 2023.³⁴



Nelayan di teluk Manila memasang perangkap ikan ‘saprahan’ yang tidak bergerak.
Kredit foto: Kathleen Lei Limayo.



Sebuah foto pasukan bersenjata yang berada di komunitas nelayan Bulacan sebelum pengusuran mereka untuk pembangunan bandara. Komunitas telah melaporkan adanya intimidasi dan penahanan sewenang-wenang oleh pasukan bersenjata. Kredit foto: AKAP KA Teluk Manila

- 34 NRC. Artikel berita di koran Belanda. <https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/03/op-de-filippijnen-is-boskalis-een-scheldwoord-geworden-a4156007?t=1705559099>
- 35 Fair Green Global. Cerita tentang Centre Point Indonesia. <https://fairgreenglobal.org/stories/the-story-of-centre-point-indonesia/>
- 36 Mongabay. Ketika laut Takalar terus terancam oleh penambangan pasir. https://www.mongabay-co-id.translate.google/2017/05/30/ketika-laut-takalar-terus-terancam-tambang-pasir/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en; Mongabay. Penambangan pasir, reklamasi tanah menghadapi perlawanan keras di Makassar. <https://news.mongabay.com/2017/07/sand-mining-land-reclamation-meet-fierce-resistance-in-makassar/>; Mongabay. Menolak penambangan pasir, Komunitas Galesong Utara lapor ke KPK. <https://www.mongabay-co-id>.



Perwakilan Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil di Filipina berdemonstrasi menentang reklamasi tanah di Teluk Manila. Proyek bandara ini merupakan proyek reklamasi terbesar dan paling kontroversial di Teluk Manila. Kredit foto: Global Witness dan Basilio.

Di **Makassar, Indonesia**, banyak keluarga terpaksa mengungsi untuk memberi jalan di pulau-pulau buatan yang berbentuk Garuda yang membentuk **Centre Point of Indonesia** (CPI), yang dikembangkan oleh Boskalis. CPI dibangun untuk membuat real estate kelas atas – perumahan yang tidak dapat diakses sama sekali oleh populasi rentan di wilayah tersebut. Pulau-pulau baru ini rencananya akan tumpang tindih dengan pulau-pulau yang sudah ada yang terbentuk secara alami di wilayah delta, yang merupakan rumah bagi 43 keluarga. Meskipun mereka telah tinggal di lahan tersebut selama beberapa dekade, keluarga-keluarga ini telah diinformasikan, melalui surat pengusuran, bahwa lahan tersebut merupakan milik PT Yasmin Asmi Buri, yang berupaya mengembangkan proyek tersebut atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Perusahaan Ciputra Group. Keluarga-keluarga tersebut diberitahu bahwa mereka memiliki waktu kurang dari sebulan untuk meninggalkan rumah mereka dan tidak berhak atas kompensasi. Pada tanggal 10 Maret 2014, polisi dan pasukan militer menghancurkan seluruh bangunan di wilayah delta. Menjadi tunawisma, beberapa warga yang digusur terpaksa tinggal dibawah jembatan terdekat selama bertahun-tahun, sedangkan

yang lainnya tinggal secara ilegal di ruang-ruang publik atau di kamar kecil yang sangat padat.³⁵

Jauh dari meningkatkan kehidupan masyarakat lokal, proyek CPI telah merusak ekologi pesisir dengan parah, yang berkontribusi terhadap semakin menguatnya siklus buruk kemiskinan masyarakat pesisir. Untuk kasus reklamasi tanah lainnya, dampak-dampak juga disebabkan oleh penambangan pasir untuk reklamasi, yang terjadi di area dekat pantai Galesong sekitar 20km jauhnya. Para nelayan di Galesong menentang secara keras penambangan pasir melalui demonstrasi, pengaduan resmi, dan konfrontasi dengan kapal penambangan pasir yang mendapat tindakan represif.³⁶ Penangkapan ikan di tempat penangkapan dekat pantai yang populer telah berkurang hingga 80 persen,³⁷ yang memaksa para nelayan pergi lebih jauh untuk menangkap ikan, hingga meningkatkan kebutuhan mereka akan bahan bakar – dari sekitar 1,5 liter per hari hingga antara 5-10 liter per hari – serta biaya lainnya.³⁸ Selain itu, erosi pantai dari penambangan pasir telah menyebabkan masyarakat lokal terkena gelombang laut, yang mengakibatkan kerusakan pada lokasi penangkapan, rumah, dermaga, dan kuburan.

HEADLINE

Sand mining, land reclamation meet fierce resistance in Makassar

By Rahmat Hardiansya, Wahyu Chandra on 10 July 2017 / Adapted by Basten Gokkon / Mongabay news tahun 2017 terkait protes nelayan di Makassar.³⁹

[\[translate.google.com/2017/06/08/tolak-tambang-pasir-masyarakat-galesong-utara-lapor-ke-kpk/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en\]\(https://translate.google.com/2017/06/08/tolak-tambang-pasir-masyarakat-galesong-utara-lapor-ke-kpk/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en\); Mongabay. Nelayan Indonesia yang menolak proyek pengerukan terkena upaya kriminalisasi. <https://news.mongabay.com/2020/08/indonesian-fishers-opposed-to-dredging-project-hit-by-criminalization-bid/>](https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&hl=id&gl=id&ik=en&oeq=1&oeq2=1&oeq3=1&oeq4=1&oeq5=1&oeq6=1&oeq7=1&oeq8=1&oeq9=1&oeq10=1&oeq11=1&oeq12=1&oeq13=1&oeq14=1&oeq15=1&oeq16=1&oeq17=1&oeq18=1&oeq19=1&oeq20=1&oeq21=1&oeq22=1&oeq23=1&oeq24=1&oeq25=1&oeq26=1&oeq27=1&oeq28=1&oeq29=1&oeq30=1&oeq31=1&oeq32=1&oeq33=1&oeq34=1&oeq35=1&oeq36=1&oeq37=1&oeq38=1&oeq39=1&oeq40=1&oeq41=1&oeq42=1&oeq43=1&oeq44=1&oeq45=1&oeq46=1&oeq47=1&oeq48=1&oeq49=1&oeq50=1&oeq51=1&oeq52=1&oeq53=1&oeq54=1&oeq55=1&oeq56=1&oeq57=1&oeq58=1&oeq59=1&oeq60=1&oeq61=1&oeq62=1&oeq63=1&oeq64=1&oeq65=1&oeq66=1&oeq67=1&oeq68=1&oeq69=1&oeq70=1&oeq71=1&oeq72=1&oeq73=1&oeq74=1&oeq75=1&oeq76=1&oeq77=1&oeq78=1&oeq79=1&oeq80=1&oeq81=1&oeq82=1&oeq83=1&oeq84=1&oeq85=1&oeq86=1&oeq87=1&oeq88=1&oeq89=1&oeq90=1&oeq91=1&oeq92=1&oeq93=1&oeq94=1&oeq95=1&oeq96=1&oeq97=1&oeq98=1&oeq99=1&oeq100=1&oeq101=1&oeq102=1&oeq103=1&oeq104=1&oeq105=1&oeq106=1&oeq107=1&oeq108=1&oeq109=1&oeq110=1&oeq111=1&oeq112=1&oeq113=1&oeq114=1&oeq115=1&oeq116=1&oeq117=1&oeq118=1&oeq119=1&oeq120=1&oeq121=1&oeq122=1&oeq123=1&oeq124=1&oeq125=1&oeq126=1&oeq127=1&oeq128=1&oeq129=1&oeq130=1&oeq131=1&oeq132=1&oeq133=1&oeq134=1&oeq135=1&oeq136=1&oeq137=1&oeq138=1&oeq139=1&oeq140=1&oeq141=1&oeq142=1&oeq143=1&oeq144=1&oeq145=1&oeq146=1&oeq147=1&oeq148=1&oeq149=1&oeq150=1&oeq151=1&oeq152=1&oeq153=1&oeq154=1&oeq155=1&oeq156=1&oeq157=1&oeq158=1&oeq159=1&oeq160=1&oeq161=1&oeq162=1&oeq163=1&oeq164=1&oeq165=1&oeq166=1&oeq167=1&oeq168=1&oeq169=1&oeq170=1&oeq171=1&oeq172=1&oeq173=1&oeq174=1&oeq175=1&oeq176=1&oeq177=1&oeq178=1&oeq179=1&oeq180=1&oeq181=1&oeq182=1&oeq183=1&oeq184=1&oeq185=1&oeq186=1&oeq187=1&oeq188=1&oeq189=1&oeq190=1&oeq191=1&oeq192=1&oeq193=1&oeq194=1&oeq195=1&oeq196=1&oeq197=1&oeq198=1&oeq199=1&oeq200=1&oeq201=1&oeq202=1&oeq203=1&oeq204=1&oeq205=1&oeq206=1&oeq207=1&oeq208=1&oeq209=1&oeq210=1&oeq211=1&oeq212=1&oeq213=1&oeq214=1&oeq215=1&oeq216=1&oeq217=1&oeq218=1&oeq219=1&oeq220=1&oeq221=1&oeq222=1&oeq223=1&oeq224=1&oeq225=1&oeq226=1&oeq227=1&oeq228=1&oeq229=1&oeq230=1&oeq231=1&oeq232=1&oeq233=1&oeq234=1&oeq235=1&oeq236=1&oeq237=1&oeq238=1&oeq239=1&oeq240=1&oeq241=1&oeq242=1&oeq243=1&oeq244=1&oeq245=1&oeq246=1&oeq247=1&oeq248=1&oeq249=1&oeq250=1&oeq251=1&oeq252=1&oeq253=1&oeq254=1&oeq255=1&oeq256=1&oeq257=1&oeq258=1&oeq259=1&oeq260=1&oeq261=1&oeq262=1&oeq263=1&oeq264=1&oeq265=1&oeq266=1&oeq267=1&oeq268=1&oeq269=1&oeq270=1&oeq271=1&oeq272=1&oeq273=1&oeq274=1&oeq275=1&oeq276=1&oeq277=1&oeq278=1&oeq279=1&oeq280=1&oeq281=1&oeq282=1&oeq283=1&oeq284=1&oeq285=1&oeq286=1&oeq287=1&oeq288=1&oeq289=1&oeq290=1&oeq291=1&oeq292=1&oeq293=1&oeq294=1&oeq295=1&oeq296=1&oeq297=1&oeq298=1&oeq299=1&oeq300=1&oeq301=1&oeq302=1&oeq303=1&oeq304=1&oeq305=1&oeq306=1&oeq307=1&oeq308=1&oeq309=1&oeq310=1&oeq311=1&oeq312=1&oeq313=1&oeq314=1&oeq315=1&oeq316=1&oeq317=1&oeq318=1&oeq319=1&oeq320=1&oeq321=1&oeq322=1&oeq323=1&oeq324=1&oeq325=1&oeq326=1&oeq327=1&oeq328=1&oeq329=1&oeq330=1&oeq331=1&oeq332=1&oeq333=1&oeq334=1&oeq335=1&oeq336=1&oeq337=1&oeq338=1&oeq339=1&oeq340=1&oeq341=1&oeq342=1&oeq343=1&oeq344=1&oeq345=1&oeq346=1&oeq347=1&oeq348=1&oeq349=1&oeq350=1&oeq351=1&oeq352=1&oeq353=1&oeq354=1&oeq355=1&oeq356=1&oeq357=1&oeq358=1&oeq359=1&oeq360=1&oeq361=1&oeq362=1&oeq363=1&oeq364=1&oeq365=1&oeq366=1&oeq367=1&oeq368=1&oeq369=1&oeq370=1&oeq371=1&oeq372=1&oeq373=1&oeq374=1&oeq375=1&oeq376=1&oeq377=1&oeq378=1&oeq379=1&oeq380=1&oeq381=1&oeq382=1&oeq383=1&oeq384=1&oeq385=1&oeq386=1&oeq387=1&oeq388=1&oeq389=1&oeq390=1&oeq391=1&oeq392=1&oeq393=1&oeq394=1&oeq395=1&oeq396=1&oeq397=1&oeq398=1&oeq399=1&oeq400=1&oeq401=1&oeq402=1&oeq403=1&oeq404=1&oeq405=1&oeq406=1&oeq407=1&oeq408=1&oeq409=1&oeq410=1&oeq411=1&oeq412=1&oeq413=1&oeq414=1&oeq415=1&oeq416=1&oeq417=1&oeq418=1&oeq419=1&oeq420=1&oeq421=1&oeq422=1&oeq423=1&oeq424=1&oeq425=1&oeq426=1&oeq427=1&oeq428=1&oeq429=1&oeq430=1&oeq431=1&oeq432=1&oeq433=1&oeq434=1&oeq435=1&oeq436=1&oeq437=1&oeq438=1&oeq439=1&oeq440=1&oeq441=1&oeq442=1&oeq443=1&oeq444=1&oeq445=1&oeq446=1&oeq447=1&oeq448=1&oeq449=1&oeq450=1&oeq451=1&oeq452=1&oeq453=1&oeq454=1&oeq455=1&oeq456=1&oeq457=1&oeq458=1&oeq459=1&oeq460=1&oeq461=1&oeq462=1&oeq463=1&oeq464=1&oeq465=1&oeq466=1&oeq467=1&oeq468=1&oeq469=1&oeq470=1&oeq471=1&oeq472=1&oeq473=1&oeq474=1&oeq475=1&oeq476=1&oeq477=1&oeq478=1&oeq479=1&oeq480=1&oeq481=1&oeq482=1&oeq483=1&oeq484=1&oeq485=1&oeq486=1&oeq487=1&oeq488=1&oeq489=1&oeq490=1&oeq491=1&oeq492=1&oeq493=1&oeq494=1&oeq495=1&oeq496=1&oeq497=1&oeq498=1&oeq499=1&oeq500=1&oeq501=1&oeq502=1&oeq503=1&oeq504=1&oeq505=1&oeq506=1&oeq507=1&oeq508=1&oeq509=1&oeq510=1&oeq511=1&oeq512=1&oeq513=1&oeq514=1&oeq515=1&oeq516=1&oeq517=1&oeq518=1&oeq519=1&oeq520=1&oeq521=1&oeq522=1&oeq523=1&oeq524=1&oeq525=1&oeq526=1&oeq527=1&oeq528=1&oeq529=1&oeq530=1&oeq531=1&oeq532=1&oeq533=1&oeq534=1&oeq535=1&oeq536=1&oeq537=1&oeq538=1&oeq539=1&oeq540=1&oeq541=1&oeq542=1&oeq543=1&oeq544=1&oeq545=1&oeq546=1&oeq547=1&oeq548=1&oeq549=1&oeq550=1&oeq551=1&oeq552=1&oeq553=1&oeq554=1&oeq555=1&oeq556=1&oeq557=1&oeq558=1&oeq559=1&oeq560=1&oeq561=1&oeq562=1&oeq563=1&oeq564=1&oeq565=1&oeq566=1&oeq567=1&oeq568=1&oeq569=1&oeq570=1&oeq571=1&oeq572=1&oeq573=1&oeq574=1&oeq575=1&oeq576=1&oeq577=1&oeq578=1&oeq579=1&oeq580=1&oeq581=1&oeq582=1&oeq583=1&oeq584=1&oeq585=1&oeq586=1&oeq587=1&oeq588=1&oeq589=1&oeq590=1&oeq591=1&oeq592=1&oeq593=1&oeq594=1&oeq595=1&oeq596=1&oeq597=1&oeq598=1&oeq599=1&oeq600=1&oeq601=1&oeq602=1&oeq603=1&oeq604=1&oeq605=1&oeq606=1&oeq607=1&oeq608=1&oeq609=1&oeq610=1&oeq611=1&oeq612=1&oeq613=1&oeq614=1&oeq615=1&oeq616=1&oeq617=1&oeq618=1&oeq619=1&oeq620=1&oeq621=1&oeq622=1&oeq623=1&oeq624=1&oeq625=1&oeq626=1&oeq627=1&oeq628=1&oeq629=1&oeq630=1&oeq631=1&oeq632=1&oeq633=1&oeq634=1&oeq635=1&oeq636=1&oeq637=1&oeq638=1&oeq639=1&oeq640=1&oeq641=1&oeq642=1&oeq643=1&oeq644=1&oeq645=1&oeq646=1&oeq647=1&oeq648=1&oeq649=1&oeq650=1&oeq651=1&oeq652=1&oeq653=1&oeq654=1&oeq655=1&oeq656=1&oeq657=1&oeq658=1&oeq659=1&oeq660=1&oeq661=1&oeq662=1&oeq663=1&oeq664=1&oeq665=1&oeq666=1&oeq667=1&oeq668=1&oeq669=1&oeq670=1&oeq671=1&oeq672=1&oeq673=1&oeq674=1&oeq675=1&oeq676=1&oeq677=1&oeq678=1&oeq679=1&oeq680=1&oeq681=1&oeq682=1&oeq683=1&oeq684=1&oeq685=1&oeq686=1&oeq687=1&oeq688=1&oeq689=1&oeq690=1&oeq691=1&oeq692=1&oeq693=1&oeq694=1&oeq695=1&oeq696=1&oeq697=1&oeq698=1&oeq699=1&oeq700=1&oeq701=1&oeq702=1&oeq703=1&oeq704=1&oeq705=1&oeq706=1&oeq707=1&oeq708=1&oeq709=1&oeq710=1&oeq711=1&oeq712=1&oeq713=1&oeq714=1&oeq715=1&oeq716=1&oeq717=1&oeq718=1&oeq719=1&oeq720=1&oeq721=1&oeq722=1&oeq723=1&oeq724=1&oeq725=1&oeq726=1&oeq727=1&oeq728=1&oeq729=1&oeq730=1&oeq731=1&oeq732=1&oeq733=1&oeq734=1&oeq735=1&oeq736=1&oeq737=1&oeq738=1&oeq739=1&oeq740=1&oeq741=1&oeq742=1&oeq743=1&oeq744=1&oeq745=1&oeq746=1&oeq747=1&oeq748=1&oeq749=1&oeq750=1&oeq751=1&oeq752=1&oeq753=1&oeq754=1&oeq755=1&oeq756=1&oeq757=1&oeq758=1&oeq759=1&oeq760=1&oeq761=1&oeq762=1&oeq763=1&oeq764=1&oeq765=1&oeq766=1&oeq767=1&oeq768=1&oeq769=1&oeq770=1&oeq771=1&oeq772=1&oeq773=1&oeq774=1&oeq775=1&oeq776=1&oeq777=1&oeq778=1&oeq779=1&oeq780=1&oeq781=1&oeq782=1&oeq783=1&oeq784=1&oeq785=1&oeq786=1&oeq787=1&oeq788=1&oeq789=1&oeq790=1&oeq791=1&oeq792=1&oeq793=1&oeq794=1&oeq795=1&oeq796=1&oeq797=1&oeq798=1&oeq799=1&oeq800=1&oeq801=1&oeq802=1&oeq803=1&oeq804=1&oeq805=1&oeq806=1&oeq807=1&oeq808=1&oeq809=1&oeq810=1&oeq811=1&oeq812=1&oeq813=1&oeq814=1&oeq815=1&oeq816=1&oeq817=1&oeq818=1&oeq819=1&oeq820=1&oeq821=1&oeq822=1&oeq823=1&oeq824=1&oeq825=1&oeq826=1&oeq827=1&oeq828=1&oeq829=1&oeq830=1&oeq831=1&oeq832=1&oeq833=1&oeq834=1&oeq835=1&oeq836=1&oeq837=1&oeq838=1&oeq839=1&oeq840=1&oeq841=1&oeq842=1&oeq843=1&oeq844=1&oeq845=1&oeq846=1&oeq847=1&oeq848=1&oeq849=1&oeq850=1&oeq851=1&oeq852=1&oeq853=1&oeq854=1&oeq855=1&oeq856=1&oeq857=1&oeq858=1&oeq859=1&oeq860=1&oeq861=1&oeq862=1&oeq863=1&oeq864=1&oeq865=1&oeq866=1&oeq867=1&oeq868=1&oeq869=1&oeq870=1&oeq871=1&oeq872=1&oeq873=1&oeq874=1&oeq875=1&oeq876=1&oeq877=1&oeq878=1&oeq879=1&oeq880=1&oeq881=1&oeq882=1&oeq883=1&oeq884=1&oeq885=1&oeq886=1&oeq887=1&oeq888=1&oeq889=1&oeq890=1&oeq891=1&oeq892=1&oeq893=1&oeq894=1&oeq895=1&oeq896=1&oeq897=1&oeq898=1&oeq899=1&oeq900=1&oeq901=1&oeq902=1&oeq903=1&oeq904=1&oeq905=1&oeq906=1&oeq907=1&oeq908=1&oeq909=1&oeq910=1&oeq911=1&oeq912=1&oeq913=1&oeq914=1&oeq915=1&oeq916=1&oeq917=1&oeq918=1&oeq919=1&oeq920=1&oeq921=1&oeq922=1&oeq923=1&oeq924=1&oeq925=1&oeq926=1&oeq927=1&oeq928=1&oeq929=1&oeq930=1&oeq931=1&oeq932=1&oeq933=1&oeq934=1&oeq935=1&oeq936=1&oeq937=1&oeq938=1&oeq939=1&oeq940=1&oeq941=1&oeq942=1&oeq943=1&oeq944=1&oeq945=1&oeq946=1&oeq947=1&oeq948=1&oeq949=1&oeq950=1&oeq951=1&oeq952=1&oeq953=1&oeq954=1&oeq955=1&oeq956=1&oeq957=1&oeq958=1&oeq959=1&oeq960=1&oeq961=1&oeq962=1&oeq963=1&oeq964=1&oeq965=1&oeq966=1&oeq967=1&oeq968=1&oeq969=1&oeq970=1&oeq971=1&oeq972=1&oeq973=1&oeq974=1&oeq975=1&oeq976=1&oeq977=1&oeq978=1&oeq979=1&oeq980=1&oeq981=1&oeq982=1&oeq983=1&oeq984=1&oeq985=1&oeq986=1&oeq987=1&oeq988=1&oeq989=1&oeq990=1&oeq991=1&oeq992=1&oeq993=1&oeq994=1&oeq995=1&oeq996=1&oeq997=1&oeq998=1&oeq999=1&oeq1000=1)

³⁷ Fair Green Global. Cerita tentang Centre Point Indonesia.

<https://fairgreenglobal.org/stories/the-story-of-centre-point-indonesia/>

³⁸ Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Sulawesi Selatan & Institut Transnasional. Gender dan Perikanan di Indonesia. <https://longreads.tni.org/gender-and-fisheries-in-indonesia>

³⁹ Mongabay. Penambangan pasir, reklamasi tanah menghadapi perlawanan keras di Makassar. <https://news.mongabay.com/2017/07/sand-mining-land-reclamation-meet-fierce-resistance-in-makassar/>

⁴⁰ Both ENDS. Laporan Suape. <https://www.bothends.org/nl/Actueel/Publicaties/Rapport-Suape/>

⁴¹ RIMA Complementar, Avaliação de Impacto Ambiental, Estaleiro Promar S.A. – Suape, p 51.

⁴² Jalan berliku Suape. Reporter Brasil, Pernambuco. <https://reporterbrasil.org.br/2017/11/the-crooked-paths-of-suape/>

⁴³ Tatuoca, pulau yang dicuri. <https://www.youtube.com/watch?v=y5Rt0Tw0w1A>; pengusuran di Suape. <https://www.youtube.com/watch?v=ea630MgMnvs>

⁴⁴ Both ENDS. Tinjauan aktifitas pengerukan untuk saluran masuk dan cekungan pelabuhan galangan kapal Promar A.A., Suape Brazil. https://www.bothends.org/uploaded_files/document/130222_Report_Suape.pdf

⁴⁵ The Guardian. Komunitas nelayan kerang Brazil dirusak oleh polusi industri. <https://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/04/brazil-shellfishing-communities-pernambuco-industrial-pollution>



Protes para nelayan di pulau CPI. Banner bertuliskan: 'Selamatkan laut kami, tolak tambang pasir laut Takalar'.
Foto kredit: WALHI Sulawesi Selatan.



Pengusuran seorang perempuan di pulau Gusung Tanjung, Makassar, tempat masjid yang saat ini menjadi lokasi reklamasi CPI.
Kredit foto: Tribunnews.com



Satu dari 43 keluarga yang digusur dari rumah mereka untuk proyek CPI. Pria ini telah tinggal di bawah jembatan sejak pengusuran.
Kredit foto: Both ENDS, 2019.



Rusaknya kuburan sepanjang pantai Takalar akibat meningkatnya erosi pantai setelah pengerukan dari Boskalis.
Kredit foto: Both ENDS, 2019.



Protes para nelayan dekat kapal pengeruk Boskalis, bernama Queen of the Netherlands.
Kredit foto: WALHI Sulawesi Selatan.



Mantan penduduk pulau Tatuoca melihat ke pelabuhan Suape dari rumahnya, orang terakhir yang berdiri di pulau itu.
Kredit foto: Forum Suape.

Suape Industrial Port Complex di Brazil, berlokasi di Pernambuco, salah satu negara bagian paling miskin di negara ini. Selama beberapa generasi, tempat ini telah menjadi rumah bagi komunitas nelayan tradisional, dan petani skala kecil, yang banyak diantaranya merupakan keturunan budak yang berkerja di perkebunan tebu. Pada tahun 2011-2012, Pelabuhan Suape, yang merupakan perusahaan negara yang dimiliki oleh negara bagian Pernambuco,⁴⁰ diperluas oleh Van Oord. Sekitar 48 keluarga (185 individu) digusur secara paksa dari tanah mereka di pulau Tatuoca. Beberapa dari keluarga ini telah tinggal di tanah tersebut selama lebih dari 70 tahun dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak adat khusus berdasarkan hukum negara Brazil.⁴¹ Namun demikian, mereka diancam oleh pasukan keamanan pelabuhan, yang pada dasarnya merupakan milisi swasta,⁴² dan diusir secara kejam tanpa kompensasi yang memadai.⁴³

Masyarakat lokal terkena dampak yang parah dari aktifitas pengerukan dan pembuangan material hasil kerukan secara sembarangan di sepanjang pantai, termasuk di wilayah yang sangat dekat dengan garis pantai.⁴⁴ Dampak-dampak ini dikonfirmasi oleh otoritas pelabuhan Suape dan Sekretariat Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Pemerintah Pernambuco, namun tidak ada aktifitas pembersihan atau restorasi yang dilakukan. Pembangunan galangan kapal juga mengakibatkan terjadinya pemusnahan hutan bakau, sehingga berdampak pada tempat berkembang biak ikan, serta area pemetikan kerang. Dampak-dampak ini sangat dirasakan oleh perempuan lokal, yang merupakan nelayan tradisional utama di wilayah tersebut. Negara bagian Pernambuco merupakan rumah bagi 5.200 marisqueira atau perempuan nelayan kerang, yang memanen moluska, kepiting pasir, kepiting coklat, dan kerang



Pusat pengungsi di provinsi Cabo Delgado, Mozambik. Kredit foto: Justiça Ambiental.

‘Saya lebih takut dengan militer Mozambik daripada bandit. Dari militer anda mengharapkan mereka untuk membantumu, namun demikian mereka menghalangi saya untuk melakukan pekerjaan saya. Mereka ingin membungkam kabar tentang perang karena investor. Mereka tidak ingin saya melaporkan pertumpahan darah para teroris dan tentara.’ Jurnalis Mozambik⁵³

lainnya dari hutan bakau. Polusi dari pelabuhan dan industri terkait dengan pelabuhan, seperti kilang minyak, pabrik petrokimia dan tempat pelayaran, telah berdampak pada kesehatan kerang dan marisqueira, yang menderita kelainan ginekologi, penyakit kulit, dan hilangnya mata pencaharian.⁴⁵

Di Cabo Delgado, salah satu wilayah termiskin di **Mozambik**,

proyek besar gas alam cair (LNG) dikembangkan oleh TotalEnergies, yang telah mengontrak Van Oord untuk membangun infrastruktur dekat pantai, bawah laut. Proyek kontroversial ini dikembangkan dengan latar belakang pemberontakan yang disertai kekerasan di wilayah tersebut, yang menyebabkan kematian ribuan warga sipil, serta menggusur sekitar lebih 800.000 orang.⁴⁶ Sejak awal proyek, TotalEnergies gagal



Pusat pengungsi di provinsi Cabo Delgado, Mozambik. Kredit foto: Justiça Ambiental.⁵²

mempertimbangkan konteks konflik bersenjata di wilayah tersebut, dan mengabaikan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar masyarakat lokal.⁴⁷ Sebagian besar dari gas yang diekstraksi ditujukan untuk ekspor, meskipun 70% dari penduduk Mozambik hidup tanpa akses terhadap listrik.

Pembangunan fasilitas LNG, di darat maupun laut lepas, telah berkontribusi terhadap pengusuran paksa dan hilangnya mata pencaharian di wilayah tersebut, dengan 600 keluarga dimukimkan kembali

sejauh ini. Masyarakat yang digusur diberitahu bahwa mereka akan diberikan kompensasi berupa lahan baru, fasilitas, dan uang tunai, akan tetapi proses manajemen pemukiman kembali dan kompensasi sangat tidak memadai.⁴⁸ Pada tahun 2021, Human Right Watch melaporkan bahwa desa pemukiman kembali di Quitunda dalam kondisi bobrok, kekurangan air, makanan, dan layanan dasar lainnya, serta rentan terhadap serangan pemberontak.⁴⁹

Bertahun-tahun setelah digusur, sebagian besar dari keluarga yang

‘Para teroris membantai sekitar 15 orang dengan parang. Mereka menangkap dan menikam mereka sampai mati. Lalu mereka memenggal kepala mereka dan menaruhnya di dada mayat. Kemudian tentara bayaran datang dengan helikopter dan mulai menembak orang-orang.’

Saksi dari salah satu penyerangan teroris di Cabo Delgado⁵⁴

⁴⁶ Justica Ambiental!. Menantang pemerintah Inggris di pengadilan: Hentikan pendanaan gas di Mozambik! <https://ja4change.org/2021/12/06/challenging-the-uk-government-in-court-stop-financing-gas-in-mozambique/>

⁴⁷ Milieudéfensie. Laporkan kebenaran tentang TotalEnergies dan LNG Mozambik. <https://milieudéfensie.nl/actueel/report-uprights-on-total-and-lng-mozambique.pdf>

⁴⁸ Friends of the Earth Europe & Justica Ambiental!. Memicu krisis di Mozambik – Bagaimana Badan Kredit Ekspor berkontribusi terhadap perubahan iklim dan bencana kemanusiaan. <https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2022/05/Fuelling-the-Crisis-in-Mozambique.pdf>

⁴⁹ Human Rights Watch. Mozambik: Warga sipil dicegah untuk melarikan diri dari pertikaian. <https://www.hrw.org/news/2021/08/06/mozambique-civilians-prevented-fleeing-fighting>

⁵⁰ Stop Mozambique gas campaign. <https://stopmozgas.org/why-no-to-gas/human-rights/>

⁵¹ BankTrack, Milieudéfensie & Oil Change International. Terkunci dari transisi yang adil – Pembiayaan bahan bakar fosil di Afrika. https://www.banktrack.org/download/locked_out_of_a_just_transition_fossil_fuel_financing_in_africa/07_md_banktrack_fossil_fuels_africa_rpt_hr_1.pdf

⁵² Untuk gambar yang lebih banyak lihat: <https://stopmozgas.org/from-the-ground/images/>

⁵³ Menit 24 https://npo.nl/start/serie/frontlinie/seizoen-1/het-verloren-paradijs_1

⁵⁴ Menit 25 https://npo.nl/start/serie/frontlinie/seizoen-1/het-verloren-paradijs_1

⁵⁵ NRC. Belanda mengabaikan peringatan tentang penculikan dan pemenggalan kepala di sebuah proyek gas di Mozambik. <https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/01/nederland-negerde-waarschuwingen-van-eigen-ambassade-over-geweld-in-noord-mozambique-a4063888>

dimukimkan kembali belum menerima kompensasi mata pencaharian dalam bentuk lahan pertanian pengganti. Bagi yang sudah menerima, lahan seringkali jauh lebih kecil dibandingkan dengan lahan mereka yang hilang. Lahan-lahan ini juga berlokasi jauh dari desa pemukiman kembali, sehingga memaksa orang-orang untuk melakukan perjalanan jauh melalui wilayah yang dilanda konflik kekerasan. Untuk membuat masalah menjadi lebih buruk, tanah yang diberikan kepada petani-petani yang digusur telah digunakan oleh masyarakat lainnya yang sudah tinggal di wilayah tersebut, hingga menyebabkan ketegangan sosial antara kelompok yang baru dimukimkan dan masyarakat tuan rumah. Di sisi lain, para nelayan direlokasi beberapa km di wilayah pedalaman tanpa akses terhadap tempat penangkapan ikan. Meskipun tempat yang baru ditetapkan di desa terdekat, nelayan diharuskan untuk naik bus yang disewa oleh TotalEnergies untuk sampai kesana. Rencana rehabilitasi seperti ini mencerminkan buruknya pemahaman terhadap perikanan tradisional, yang tidak dapat dilakukan pada jadwal waktu yang tetap. Selain itu, pengaturan ini membatasi mobilitas dan juga mata pencaharian nelayan perempuan, yang tidak bisa lagi mengumpulkan cangkang, tanaman, dan hewan kecil di pantai.

Di kasus-kasus lainnya, keluarga yang digusur memilih kompensasi finansial daripada lahan pengganti. Namun demikian, keluarga yang memilih opsi ini diharuskan untuk menandatangani perjanjian di depan umum, yang membuat mereka sangat rentan terhadap penggeledahan dan pencurian. Hal ini mengakibatkan sejumlah insiden yang mengerikan yang meliputi pemerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Mozambik, termasuk penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.⁵⁰ TotalEnergies juga telah

menjanjikan pekerjaan pengganti bagi masyarakat yang terkena dampak, namun hanya pekerjaan jangka pendek dan tanpa keterampilan yang tersedia, seperti pekerjaan konstruksi dan kebersihan. Pekerjaan-pekerjaan ini dianggap tidak memadai oleh masyarakat lokal, khususnya perempuan.⁵¹

Proyek Reklamasi Kota Pluit, yang dikontrak oleh Boskalis dan Van Oord, meliputi pembuatan pulau buatan seluas 160 hektar untuk real estate perumahan dan komersial kelas atas, yang dibangun di atas tempat penangkapan ikan yang subur. Pulau ini merupakan satu dari 17 pulau buatan yang diusulkan untuk pengembangan di **Teluk Jakarta**, Indonesia. Namun demikian, pulau-pulau yang diusulkan ini telah menjadi sasaran penolakan publik selama beberapa dekade, serta perlawanan hukum antara pengembang properti dan pemerintah Jakarta. Pada tahun 2003, reklamasi di Teluk Jakarta dinyatakan tidak layak secara lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.⁵⁷ Keberatan utama dari reklamasi tanah adalah dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, nelayan, dan memperburuk risiko banjir di Teluk Jakarta bagian utara.

Meskipun perizinan dari sebagian besar reklamasi pulau akhirnya dicabut pada tahun 2018, reklamasi Kota Pluit diizinkan oleh pengadilan untuk dilanjutkan.⁵⁸ Terletak dekat dengan pelabuhan perikanan Muara Angke, reklamasi Kota Pluit diperkirakan berdampak pada mata pencaharian ribuan nelayan lokal, yang banyak menolak proyek tersebut. Nelayan di perairan dekat Kabupaten Serang,⁵⁹ di mana Van Oord dan Boskalis mengadakan penambangan pasir untuk reklamasi, juga menentang proyek ini, yang menyebabkan kekeruhan dan rusaknya terumbu karang serta alat penangkapan

ikan di wilayah tersebut. Meskipun menjadi salah satu dari sedikit proyek pulau yang diizinkan untuk dilanjutkan, proyek reklamasi Kota Pluit tidak pernah selesai dan kini menjadi kumpulan pasir yang belum dikembangkan yang mengumpulkan sampah di Teluk Jakarta.

Proyek Pengembangan Pelabuhan Gulhifalhu di Maladewa merupakan sebuah proyek dua tahap yang dikontrak oleh Boskalis oleh pemerintah Maladewa yang terdiri dari 192 hektar reklamasi tanah dan pembangunan pelabuhan baru. Proyek ini diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian di daerah sekitarnya. Warisan budaya Maladewa yang kaya sangat erat kaitannya dengan laut dan lingkungan laut, dan banyak praktik tradisional terkait dengan penggunaan dan konservasi sumber daya laut. Hilangnya habitat-habitat ini dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap budaya dan cara hidup masyarakat lokal, serta mata pencaharian.⁶⁰ Pengerukan untuk proyek tahap dua, yang dimulai pada bulan Juli 2023,⁶¹ akan menghancurkan laguna Gulhifalhu, yang sebagiannya telah ditetapkan sebagai kawasan laut yang dilindungi atau Marine Protected Area (MPA) sejak tahun 1995. Tiga puluh lokasi penyelaman diperkirakan terkena dampak negatif sementara terumbu alami terakhir yang tersisa yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat lokal di wilayah Greater Male yang padat akan dihancurkan.⁶² Sebagaimana ditunjukkan pada penilaian dampak lingkungan (EIA),⁶³ hal ini dapat mengganggu praktik perikanan tradisional dan wilayah penangkapan ikan umpan, yang berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan dan berdampak langsung pada nelayan, mata pencaharian mereka, dan ketahanan pangan.

HEADLINE

Total accused of manslaughter over Mozambique terrorist attack

Tujuh orang yang selamat atau keluarga korban serangan Jihadis berdarah di Palma (Mozambik) pada bulan Maret 2021 telah mengajukan pengaduan atas 'pembunuhan tidak sukarela dan kegagalan untuk menyediakan bantuan kepada seseorang yang dalam bahaya terhadap TotalEnergies, yang saat itu melakukan mega proyek gas di wilayah tersebut.⁵⁶

⁵⁶ TotalEnergies dituduh melakukan pembunuhan atas serangan teroris Mozambik. <https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/Ing-africa/538716/total-accused-of-manslaughter-over-mozambique-terrorist-attack/>

⁵⁷ Keputusan no.14 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa proyek reklamasi tidak layak secara lingkungan.

⁵⁸ Kompas. Sejarah panjang pulau G, yang kini dipenuhi sampah dan terkikis air laut. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/26/16393831/sejarah-panjang-pulau-g-yang-kini-dipenuhi-sampah-dan-terkikis-air-laut?page=all>

⁵⁹ Video dari protes nelayan pada tahun 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=BrEPyWR9Hsw>

⁶⁰ Banktrack. Proyek Reklamasi Gulhifalhu. https://www.banktrack.org/project/gulhifalhu_dredging_and_reclamation_project_maldives

⁶¹ Dredging Today. Boskalis memulai tahap kedua proyek reklamasi tanah Gulhifalhu. <https://www.dredgingtoday.com/2023/07/04/boskalis-kicks-off-second-phase-of-gulhifalhu-land-reclamation-project/>

⁶² Contested Ports - Gulhifalhu, Maladewa. Surat terbuka untuk Belanda, dari Maladewa yang terancam punah secara lingkungan. <https://www.contestedports.com/gulhifalhu-maldives/>

⁶³ Laporan Penilaian Dampak Lingkungan Gulhifalhu. <https://www.gulhifalhu.mv/wp-content/uploads/2021/12/EIA-V1.pdf>

⁶⁴ NOS. Protes di Maladewa terhadap proyek perusahaan pengerukan besar Belanda. <https://nos.nl/artikel/2468266-protest-tegen-projecten-van-grote-nederlandse-baggerbedrijven-in-de-malediven>

⁶⁵ Ekonomi Ekologis. Barang dan jasa ekologis ekosistem terumbu karang. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800999000099>

HEADLINE

Protest tegen projecten van grote Nederlandse baggerbedrijven in de Malediven

'Protes di Maladewa terhadap proyek perusahaan besar pengerukan Belanda.' Berita Utama di situs berita Belanda NOS, 21 Maret, 2023.⁶⁴

HEADLINE

Nederland negeerde bij gasproject waarschuwingen over ontvoeringen en onthoofdingen in Mozambique

'Belanda mengabaikan peringatan tentang penculikan dan pemenggalan kepala di Mozambik. Dua kementerian Belanda mengabaikan peringatan dari kedutaan mereka tentang partisipasi dalam sebuah proyek gas di Mozambik Utara. Perusahaan pengerukan Van Oord harus keluar karena kekerasan tersebut.' Berita utama di koran Belanda NRC, 1 November 2021.⁵⁵

4.3 EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT

Bahaya yang diakibatkan oleh proyek pengerukan yang dialami oleh masyarakat lokal selaras dengan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Selain mendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir, ekosistem pesisir dan laut sangat krusial – dan sangat rentan – bagi habitat untuk tanaman dan organisme lainnya. Lamun dan hutan bakau, yang berevolusi untuk bertahan hidup di perairan asin, menyediakan lingkungan penting untuk mendukung rantai makanan perairan yang rumit, termasuk ikan, siput, kerang, kepiting, dan udang. Hewan-hewan air ini selanjutnya mendukung beragam spesies burung termasuk burung yang bermigrasi. Dataran lumpur dangkal dan terumbu karang, yang dikenal dengan ‘hutan hujan laut’, merupakan pusat keanekaragaman hayati yang terkenal. Secara historis, ekosistem ini telah mendukung sepertiga dari ikan dunia, meskipun hanya menutupi 0,1% - 0,5% dasar laut.⁶⁵

Vegetasi dan bentang alam pesisir seperti gundukan pasir, pantai, dan bukit pasir tidak hanya mengatur kualitas air dengan cara mencegah intrusi air asin, namun juga membentuk penyangga alami terhadap banjir dan kenaikan permukaan laut.⁶⁶ Ekosistem pesisir sangat baik untuk menyimpan karbon dan dianggap sebagai salah satu bentuk mitigasi iklim yang paling hemat biaya. Hutan bakau, rawa pasang surut dan padang lamun terkadang disebut ‘ekosistem karbon biru’ karena secara terus-menerus menyerap karbon dioksida di atmosfer, yang secara efektif menyimpan jumlah karbon yang besar di dalam tanah dan sedimen.⁶⁷ Faktanya, bakau diketahui menyimpan tiga hingga lima kali jumlah karbon per hektar dibandingkan dengan hutan tropis.⁶⁸ Demikian pula, semakin banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana sedimen laut memainkan peranan penting dalam menyerap karbon dan bahwa gangguan pada dasar laut, seperti penambangan pasir, berpotensi menyebabkan karbon dilepaskan kembali ke atmosfer.⁶⁹

4.4 KERUSAKAN HABITAT DAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI

Semakin banyak penelitian akademis yang menunjukkan bagaimana pengerukan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan keanekaragaman hayati, termasuk ikan, burung, dan kehidupan laut lainnya.⁷⁰ Dampak ini dapat terjadi baik di lokasi penggalian atau sekitarnya, serta di lokasi pembuangan material (dengan cara pembuangan atau reklamasi). Dampak-dampak terhadap kehidupan laut akibat aktifitas pengerukan meliputi tekanan sedimen dan kekeruhan dari material hasil kerukan yang tersuspensi di air dan diendapkan di habitat. Gumpalan sedimen dapat meluas beberapa kilometer dari operasi pengerukan, tergantung pada kondisi hidrodinamik setempat. Dampak lainnya dapat diakibatkan oleh pelepasan kontaminan beracun, polusi suara yang mempengaruhi mamalia laut dan masuknya hidrolis (penyerapan langsung organisme akuatik seperti telur ikan, larva, melalui saluran isap yang dihasilkan selama operasi pengerukan).

Sepanjang pantai Pernambuco di Brazil, perluasan **Suape Port Industrial Complex** difasilitasi dengan memberikan kewenangan atas perusakan floral alami, termasuk bakau, restas (jenis berbeda dari hutan berdaun lebar lembab tropis dan subtropis pesisir) dan hutan Atlantik, yang sebelumnya dikategorikan sebagai kawasan pelestarian permanen. Pada kasus bakau, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar dari yang direncanakan. Akibat dari tempat pembuangan sampah, pengerukan, dan pembuangan, hubungan antara sungai dan laut menjadi terganggu, sehingga mengubah hidrodinamika kawasan secara drastis.⁷¹ Kawasan hutan bakau yang dihancurkan hampir dua

‘Setelah lebih dari sepuluh tahun kami masih merasakan dampaknya – berkurangnya jumlah ikan sebanyak 70%. Kami bahkan tidak bisa memasok restoran kami. Ketika kami menyelam, kami melihat dasar laut yang dinamit yang dibunuh oleh Van Oord. Pengeruk mulai menghancurkannya selama musim berkembang biak lobster. Mereka bahkan tidak memperhitungkan kapal karam yang tenggelam pada zaman Portugis dan Belanda.’ Pemimpin asosiasi nelayan di Suape



Pulau Tatuoca tertutup pasir akibat aktifitas pengerukan yang dilakukan oleh Van Oord.
Kredit foto: Forum Suape

kali lipat dari jumlah yang diizinkan, menghilangkan tempat berkembang biak yang penting bagi spesies air. Di tempat lainnya, terumbu karang dihancurkan dan stok ikan berkurang sebanyak 70%, akibat penggunaan bahan peledak, dan pembuangan limbah pengerukan yang tidak bertanggung jawab di tempat penangkapan ikan.⁷²

Mozambik, sebuah negara yang terkena dampak besar perubahan iklim seperti angin topan,⁷³ menampung sekitar 60% hutan bakau yang masih tersisa di wilayah Afrika bagian timur. Bagian pesisir utara negara ini, khususnya di **Cabo Delgado**, tempat



proyek LNG direncanakan, merupakan rumah bagi beberapa terumbu karang dengan keanekaragaman spesies paling tinggi, dan padang lamun produktif di wilayah tersebut, yang menyediakan tempat berkembang biak dan habitat mencari makan bagi ikan dan kura-kura. Proyek LNG meliputi pengerukan, pengeboran, pembuangan bahan limbah beracun, baik di darat maupun lepas pantai, serta pembangunan infrastruktur bawah laut, dekat pantai, dan di pantai yang luas. Aktifitas-aktifitas ini akan menyebabkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang besar seperti gangguan kebisingan, kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁷⁴ Spesies yang terkena dampak termasuk spesies yang dianggap terancam oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), seperti paus sei, elang laut hidung kuning India, tempayan, penyu hijau, penyu belimbing, dan penyu sisik. Selain itu, pembangunan taman LNG akan menghancurkan lahan pertanian, hutan, dan garis pantai alami, rumah bagi beragam hewan dan tumbuhan.⁷⁵ Bank Dunia baru-baru ini memperkirakan bahwa 'tingkat investasi yang dibutuhkan [di Mozambik] pada tahun 2030 untuk

⁶⁶ Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (2023). Mangrove - "ekosistem lahan basah yang luar biasa" – Dr Mumba. <https://www.ramsar.org/news/mangroves-incredible-wetlands-ecosystem-dr-mumba>

⁶⁷ Asosiasi Iklim Silvestrum untuk Panel Tinjauan Ilmiah dan Teknis Konvensi Lahan Basah. Studi Desktop Ekosistem Karbon Biru di Situs Ramsar. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/bn12_blue_carbon_ccmitigation_e.pdf

⁶⁸ Nature. Mangrove merupakan salah satu hutan paling kaya karbon di daerah tropis. <https://www.nature.com/articles/ngeo1123>

⁶⁹ Karbon Biru di Kawasan Laut yang Dilindungi: Bagian 3: Penilaian Karbon Biru pada Suaka Laut Nasional Greater Farallones dan Cordell Bank. <https://sanctuaries.noaa.gov/science/conservation/blue-carbon-in-marine-protected-areas-part-3.html>

⁷⁰ Ikan dan Perikanan. Sebuah analisis kritis dari dampak langsung pengerukan terhadap ikan. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12218>; Journal for Nature Conservation. The negative effect of dredging and dumping on shorebirds at a coastal wetland in northern Spain. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2017.02.006>

⁷¹ Studi Regional dalam Ilmu Kelautan. Merekonstruksi sejarah dampak lingkungan pada ekosistem mangrove tropis. Sebuah studi kasus dari Suape port-industrial complex. https://www.researchgate.net/publication/350209718_Reconstructing_the_history_of_environmental_impact_in_a_tropical_mangrove_ecosystem_A_case_study_from_the_Suape_port-industrial_complex_Brazil

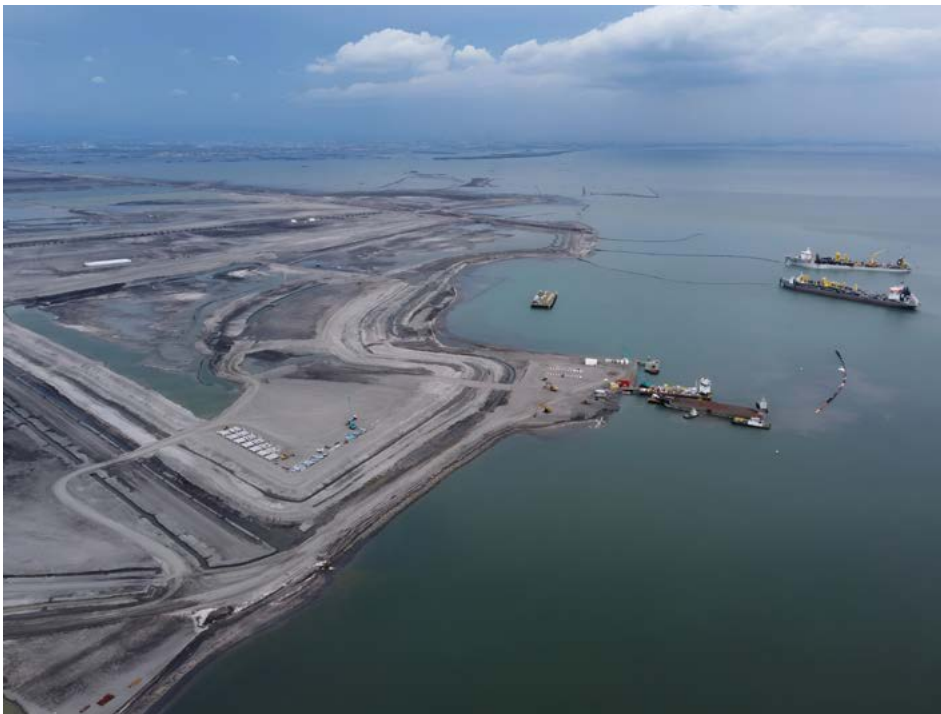
mencapai ketahanan iklim modal manusia, fisik dan alam berjumlah hingga 37,2 miliar US dolar.⁷⁶ Dana tersebut perlu dikeluarkan untuk pembangunan jalan, bangunan, pertanian, irigasi, dan untuk mengatasi kenaikan permukaan laut serta angin topan yang lebih kuat. Seorang pakar menyimpulkan bahwa sekitar setengah dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima Mozambik dari gas dalam waktu 30 tahun harus digunakan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh iklim, sementara sisanya harus digunakan untuk melawan kekerasan.⁷⁷

Teluk Manila Bagian Utara di Filipina, termasuk wilayah **Bulacan**, tempat proyek bandara dikembangkan, telah diberi label Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (KBA) dan lokasi prioritas untuk konservasi di Filipina oleh berbagai organisasi konservasi internasional.⁷⁸ Zona pesisir Bulacan juga telah

diberi label Zona Perlindungan Ketat dalam Rencana Utama Pembangunan Berkelanjutan Teluk Manila (MBSDMP) karena memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.⁷⁹ Hutan bakau dan dataran lumpurnya menjadi salah satu tempat berkumpul terbesar bagi burung-burung yang bermigrasi di jalur terbang Australasia Timur yang membentang dari Australia hingga Rusia, termasuk sembilan spesies yang terancam punah secara global.⁸⁰

Pengembangan bandara telah menimbulkan malapetaka terhadap ekosistem lahan basah yang kritis,⁸¹ termasuk perusakan hutan bakau secara ilegal dan meluas.⁸² Proyek ini telah menghancurkan dataran lumpur yang menjadi tempat mencari makan bagi burung-burung air yang bermigrasi dan menetap, yang populasinya telah berkurang sebanyak 20 persen⁸³ dan meningkatnya resiko bencana bagi masyarakat sekitar.⁸⁴

Mitra proyek San Miguel, Boskalis dan Atradius DSB telah berupaya untuk menangkis kekhawatiran dari ahli lingkungan hidup dengan berjanji untuk mengembangkan proyek biodiversity offset sebagai kompensasi atas hilangnya habitat burung dan bakau, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa biodiversity offset merupakan strategi yang tepat (lihat kotak di bawah). Lokasi offset awalnya direncanakan seluas 1.000-1.700 hektar pada saat Boskalis diberikan dukungan ekspor.⁸⁵ Namun, baru pada bulan Februari 2024, lebih dari tiga tahun Boskalis mendapatkan proyek tersebut, lokasi offset yang secara resmi ditetapkan hanya seluas 40 hektar. Mitra proyek telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan lokasi offset yang lebih banyak, akan tetapi masih belum jelas kapan dan di mana ini akan dilakukan. Dan bahkan jika lokasi tersebut akhirnya ditetapkan, setidaknya dibutuhkan 2-3 tahun tambahan, dengan kondisi yang tepat, agar biomasa bawah tanah terakumulasi dalam jumlah yang cukup agar bernilai (produktif) bagi burung. Selain itu, bahkan jika lokasi permanen dikembangkan untuk kehidupan burung, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa terlindungi dari perkembangan pesat di sekitar bandara dalam beberapa tahun yang akan datang.



Reklamasi Bandara Internasional Manila Baru telah mengubah salah satu kawasan utama keanekaragaman hayati di Filipina menjadi sebuah lahan tandus.
Kredit foto: Global Witness dan Basilio



‘Saya telah memancing sejak berumur delapan tahun. Saya mengetahui tentang pengerukan ketika saya pergi memancing. Tempatnya menjadi terbatas dan kami melihat limbah yang langsung masuk ke hutan bakau. Banyak spesies mati – tiram, kerang, bahkan aratu. Limbahnya juga mengiritasi kulit saya.’ Marisqueira (nelayan kerang perempuan) dari Lagoa do Zumbi di Suape

KLAIM YANG TIDAK TERBUKTI DARI BIODIVERSITY OFFSET

Dalam beberapa tahun terakhir, kontraktor kelautan dan stakeholder industri telah menggaungkan yang disebut proyek biodiversity offset sebagai cara untuk mengkompensasi kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang disebabkan oleh operasi bisnis mereka. Asumsi yang mendasari proyek ini adalah hilangnya keanekaragaman hayati di suatu tempat dapat dikompensasi dengan upaya restorasi di tempat lainnya, sehingga diperkirakan menghasilkan tidak adanya kerugian bersih atau No Net Loss (NNL) dari penanda keanekaragaman hayati yang dipilih di wilayah tertentu. Biodiversity offset banyak dipertentangkan, karena tidak mencegah hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah aktifitas bisnis utama. Yang lebih penting lagi, penelitian ilmiah mengenai offset dan NNL belum menunjukkan hal ini merupakan strategi perlindungan keanekaragaman hayati yang tepat.⁸⁶ Terlebih lagi, penelitian mengenai efektifitas biodiversity offset sangat bias terhadap negara-negara bagian utara. Contohnya, tinjauan terbaru dari publikasi ilmiah mengenai efektifitas NNL tidak menemukan studi yang kredibel mengenai proyek offset yang ada di Amerika Latin, Afrika, atau Asia,⁸⁷ di mana kemampuan kelembagaan dan sumber daya keuangan untuk offset biasanya lebih terbatas.

⁷² Both ENDS. Suape: perluasan pelabuhan mengancam surga. <https://www.bothends.org/en/Our-work/Dossiers/Suape-port-expansion-threatens-paradise?template=print>; Setelah upaya bertahun-tahun, termasuk sebuah pengaduan resmi berdasarkan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, organisasi lokal akhirnya berhasil membuka sebagian bendungan yang menghalangi aliran alami sungai dan air pasang. <https://www.bothends.org/en/Whats-new/News/How-the-mangroves-in-Suape-are-growing-back/>

⁷³ Reliefweb. Dari Risiko Iklim hingga Ketahanan: Membuka Dampak Ekonomi dari Perubahan Iklim di Mozambik, November 2023. <https://reliefweb.int/report/mozambique/climate-risk-resilience-unpacking-economic-impacts-climate-change-mozambique-november-2023>

⁷⁴ Friends of the Earth Europe & Justica Ambiental. Memicu Krisis di Mozambik – Bagaimana Badan Kredit Ekspor berkontribusi terhadap perubahan iklim dan bencana kemanusiaan. <https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2022/05/Fuelling-the-Crisis-in-Mozambique.pdf>

⁷⁵ Justica Ambiental!. Dampak industri LNG di Cabo Delgado, Mozambik. https://www.banktrack.org/download/the_impacts_of_the_lng_industry_in_cabo_delgado_mozambique/impacts_of_lng_in_mozambique_by_ja.pdf

⁷⁶ The World Bank. Laporan Iklim dan Pembangunan Negara Mozambik (CCDR). <https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/publication/mozambique-afe-country-climate-and-development-report-ccdr>

⁷⁷ Buletin Joseph Hanlon, 4 Januari, 2024. https://www5.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/files/Mozambique_634_4Jan24_Elections_Cabo-Delgado_Feijo_gas.pdf



Protes di bawah laut terhadap Boskalis oleh nelayan di Makassar. Kredit foto: WALHI Sulawesi Selatan.

Garis pantai Indonesia menampung sedikitnya 2,6 juta hektar terumbu karang, yang meliputi 25% terumbu karang di wilayah ini dan 8% terumbu karang dunia. Pulau Sulawesi, tempat **Centre Point of Indonesia** dikembangkan, merupakan rumah bagi beberapa terumbu karang yang paling menakjubkan, habitat bagi ikan-ikan eksotis seperti ikan badut berwarna cerah dan ikan kalajengking.⁸⁸ Selama pekerjaan lapangan di Makassar yang dilakukan oleh perwakilan WALHI Sulawesi Selatan, nelayan melaporkan meningkatnya erosi dan energi gelombang akibat pendalaman dasar laut dan hilangnya karang, yang sebelumnya memecah gelombang dan melunakkannya. Hal ini menyebabkan rusaknya dermaga, tembok laut, pemecah gelombang dan peralatan penangkapan ikan.



Reklamasi Gulhifalhu telah dikembangkan dengan pasir yang ditambang dari sebuah kawasan laut yang dilindungi yang perbatasannya telah diubah untuk memungkinkan penambangan, yang jika tidak dilakukan akan dianggap ilegal. Kredit foto: Save Maldives Campaign

Proyek Pelabuhan Gulhifalhu di Maladewa diperkirakan akan menghancurkan sebuah kawasan laut yang dikenal dengan Hans Haas Place (atau Kiki Reef), yang telah dilindungi oleh hukum negara Maladewa sejak tahun 1995. Kawasan laut yang dilindungi lainnya dan kawasan sensitif lingkungan terletak di dalam zona dampak proyek tersebut, yang merupakan aktifitas reklamasi terdapat dalam sejarah Maladewa.⁸⁹ Sejak tahun 2021, proyek ini telah menjadi subjek kasus pengadilan perdata oleh warga yang berupaya untuk menghentikan proyek pengembangan karena dampak buruknya terhadap lingkungan. Boskalis telah menyatakan relokasi karang sebagai strategi biodiversity offset, meskipun hanya sedikit bukti dari keberhasilannya dan peringatan eksplisit dari organisasi lingkungan dan kelompok penyelam di Maladewa mengenai kegagalan dari inisiatif tersebut.⁹⁰ Tidak ada studi independen terkait keberhasilan relokasi karang di Maladewa hingga saat ini yang menunjukkan manfaat pemulihan bagi hilangnya jasa ekosistem atau mata pencaharian masyarakat.⁹¹ Selain itu, sebuah laporan sementara mengenai perkembangan relokasi karang menyatakan bahwa saat ini sedang ditentukan di lokasi karang mana dan berapa banyak karang yang 'layak untuk direlokasi dalam jangka waktu yang tersedia, yaitu sekitar dua minggu'.⁹² Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tempat relokasi 'tidak mendukung koloni karang alami' karena kurangnya substrat keras untuk melakukan transplantasi karang. Lebih jauh, jumlah koloni karang yang akan direlokasi juga tidak pasti karena tantangan logistik yang tidak terduga akibat lockdown Covid-19, yang juga mencegah pengujian kualitas air tertentu yang diperlukan untuk proses tersebut. Perancangan yang serampangan dan terbatasnya waktu yang dialokasikan untuk proses relokasi menunjukkan rendahnya prioritas yang diberikan terhadap hilangnya karang.

⁷⁸ Konservasi Internasional Filipina, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, & Yayasan Haribon. Situs prioritas untuk konservasi di Filipina: Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (KBA). <https://www.slideshare.net/no2mininginpalawan/priority-sites-for-conservation-in-the-philippines-key-biodiversity-areas-kba>

⁷⁹ Orang-orang dalam PowerPoint Pixels: Persaingan klaim keadilan dan politik skalar dalam perencanaan pembangunan air. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096262982300152X>

⁸⁰ Birdlife. Majalah Januari-Maret 2022, halaman.56. <https://magazine.birdlife.org/birdlife-magazine-jan-mar-2022.html>

⁸¹ Surat Kekhawatiran CSO terkait Teluk Manila. https://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/2021-07_Letter_of_Concern_NMIA_-_Ministry_Finance.pdf

⁸² Global Witness. Risiko Landasan Pacu. https://www.globalwitness.org/documents/20477/Runaway_Risk_-_February_2023.pdf

⁸³ IUCN-NL. Sensus Burung Air Baru di Teluk Manila menunjukkan penurunan sebesar 20% dalam tiga tahun. <https://www.iucn.nl/en/news/new-waterbird-census-in-manila-bay-shows-20-decline-over-three-years/>; Situs Burung air yang penting secara internasional di Teluk Manila, Filipina. https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/2018_wi-iucn_nl_-_internationally_important_waterbird_sites_in_manila_bay.pdf

⁸⁴ Rappler. Aetropolis meningkatkan risiko bencana untuk masyarakat Bulacan. <https://www.rappler.com/environment/aerotropolis-airport-heightens-disaster-risks-communities-bulacan/>

⁸⁵ San Miguel dan Boskalis. Rangkuman Non-Teknis Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati. https://www.sanmiguel.com.ph/storage/files/reports/Biodiversity_Non-Technical_Summary.pdf

⁸⁶ Forest Trends. Oryx. Biodiversity offset dalam teori dan praktik. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/Bull_etal_2013_Oryx.pdf; Biological Conservation.

What are we measuring? A review of metrics used to describe biodiversity in offsets exchanges. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719309620?via%3Dihub>

⁸⁷ Surat Konservasi. Hasil ekologis dari biodiversity offset berdasarkan kebijakan "tanpa kerugian bersih": Sebuah tinjauan global. <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12664>

⁸⁸ Reuters - Environment. Karang Indonesia terancam oleh perubahan iklim. <https://www.reuters.com/article/environment-climate-indonesia-coral-idUSJAK3223520071128>

⁸⁹ https://www.banktrack.org/project/gulhifalhu_dredging_and_reclamation_project_maldives

⁹⁰ Save Maldives Campaign. Reklamasi Laut di Maladewa: utang, kehancuran dan kerusakan dalam keadaan darurat iklim. <https://savemaldives.net/marine-rec/>; Sun. Gulhifalhu reclamation commenced, danger to dive sites!. <https://en.sun.mv/60709>

⁹¹ BankTrack. Proyek Reklamasi Gulhifalhu - Maladewa. https://www.banktrack.org/project/gulhifalhu_dredging_and_reclamation_project_maldives

⁹² Boskalis Westminster Contracting Ltd. Relokasi Karang Gulhifalhu – Intermediate update. <https://files.epa.gov.mv/file/1859>

⁹³ Both ENDS. Mengeruk dalam gelap. <https://www.bothends.org/en/Whats-new/Publicaties/Dredging-in-the-Dark/>

⁹⁴ NRC. Beberapa pelajaran keberlanjutan bagi perusahaan besar India yang kontroversial, dan kesepakatan diwujudkan. <https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/05/een-paar-duurzaamheidslessen-voor-het-omstreden-indiase-megabedrijf-en-de-deal-gaat-door-a4150512>

BAB 5

MENCEGAH DAN MEMITIGASI DAMPAK BURUK? TINDAKAN ATRADIUS DSB, PEMERINTAH BELANDA, DAN PARA PENERUK

Seluruh proyek pengerukan di dalam laporan ini terlaksana berkat dukungan pemerintah Belanda melalui Badan Kredit Ekspor Belanda, Atradius. Meskipun Atradius DSB memiliki kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan Internasional (ICSR), dan telah membuat beberapa perbaikan untuk ini selama bertahun-tahun (dibahas di bawah ini), kebijakan dan praktiknya masih tetap gagal. Di bawah ini kami menjelaskan isu-isu penting yang terjadi berulang kali dan kelemahan kebijakan dan praktik dari Atradius DSB yang terkait dengan pencegahan dan mitigasi dampak buruk sektor pengerukan Belanda.

5.1 BOBOT UJI TUNTAS SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG TERBATAS

Untuk setiap permohonan asuransi kredit ekspor yang diterima, Atradius DSB mengadakan uji tuntas lingkungan dan sosial, selain uji tuntas keuangan. Pemohon harus menyediakan seluruh informasi sosial dan lingkungan yang sesuai dengan proyek tersebut. Selama proses uji tuntas sosial dan lingkungan, Atradius DSB menilai dampak (yang diperkirakan) dan langkah mitigasi dari proyek tersebut untuk dapat memahami apakah dampak tersebut 'dapat diterima' berdasarkan standar internasional dan memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi. Namun demikian, Atradius DSB sering mengeluarkan apa yang disebut dengan 'janji perlindungan' ketika uji tuntas keuangan dianggap memuaskan, yang biasanya dilakukan

sebelum proses uji tuntas lingkungan dan sosial selesai. Perjanjian perlindungan menyiratkan bahwa klien untuk sementara mendapat jaminan atas asuransi yang mengikat secara hukum, dengan syarat bahwa hasil akhir dari uji tuntas sosial dan lingkungan juga dianggap memuaskan. Dalam praktiknya, hal ini berarti uji tuntas sosial dan lingkungan mendapat tekanan dari perusahaan dan bank yang ingin membuat kesepakatan, serta dari pemerintah (baik Belanda ataupun pemerintah tuan rumah) yang ingin mendukung bisnis mereka secara ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bobot relatif uji tuntas lingkungan dan sosial dalam proses penilaian asuransi.

Kasus **Terusan Suez** menjadi contoh nyata tidak pentingnya uji tuntas lingkungan dan sosial dalam proses penilaian.⁹³ Dua kementerian Belanda yang bertanggung jawab atas ECA Belanda, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, memilih untuk menyetujui asuransi tersebut meskipun Atradius DSB telah menginformasikan kementerian tersebut bahwa mereka tidak dapat melakukan proses uji tuntas sosial dan lingkungan yang memadai. Persetujuan ini diberikan dengan dasar untuk melindungi perusahaan pengerukan Belanda dari kerugian kompetitif yang berhubungan dengan proses uji tuntas yang ketat dan memakan waktu. Meskipun regulasi yang memungkinkan hal ini terjadi telah dihapus dari kebijakan Atradius DSB, kasus terbaru menunjukkan

bagaimana kepentingan sektor swasta Belanda terus diprioritaskan dibandingkan dengan proses uji tuntas yang ketat.⁹⁴

Sehubungan dengan **proyek pelabuhan Gulhifalhu di Maladewa**, Konsultan uji tuntas Atradius DSB tidak dapat melakukan perjalanan ke Maladewa karena pembatasan perjalanan yang terkait dengan COVID. Sebaliknya, proses uji tuntas diadakan secara online, yang berarti Atradius DSB tidak memperoleh pengalaman langsung terkait konteks proyek dan situasi masyarakat yang terkena dampak. Terkait dengan **proyek LNG Mozambik**, sejak tahun 2017 organisasi seperti Both ENDS, Milieudefensie, UPC, Justica Ambiental dan sejumlah organisasi Mozambik lainnya telah memperingatkan Atradius DSB, pemerintah Belanda, TotalEnergies dan Van Oord terkait pelanggaran HAM, meningkatnya kekerasan, kerusakan iklim dan risiko ekonomi yang terkait dengan proyek tersebut. Namun demikian asuransi tetap diberikan. Menanggapi kritik dari masyarakat sipil dan atas permintaan anggota parlemen Belanda, pemerintah Belanda setuju untuk melakukan penelitian independen terhadap proses uji tuntas. Penelitian yang dilakukan oleh Proximities Risk Consultancy, menemukan bahwa Atradius DSB dan pemerintah Belanda kurang mendengarkan kekhawatiran dari masyarakat sipil atau kedutaan besar Belanda selama proses uji tuntas.⁹⁵ Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Atradius DSB mengabaikan informasi yang tersedia terkait dengan situasi keamanan di wilayah proyek dan juga 'gagal menjamin objektivitas yang memadai dalam analisis keamanan proyek'. Laporan ini menyimpulkan bahwa Atradius DSB kurang memiliki keahlian dan mandat untuk menilai situasi keamanan dengan tepat. Demikian pula, dampak iklim dari

pengembangan fosil secara besar-besaran hampir tidak dipertimbangkan selama proses uji tuntas dan tidak ada penilaian yang dilakukan mengenai apakah proyek tersebut sesuai dengan skenario 1,5 derajat Badan Energi Internasional (IEA).

5.2 KETERBUKAAN PUBLIK YANG TIDAK MEMADAI MENGENAI PENILAIAN PROYEK, RENCANA MITIGASI, DAN PEMANTAUAN

Kesenjangan utama dalam kebijakan Atradius DSB dan praktiknya adalah penolakannya untuk memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel selama dan setelah penilaian permohonan asuransi. Standar internasional tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab mengharuskan tersedianya informasi yang memadai bagi stakeholder agar dapat menilai kecukupan langkah-langkah mitigasi dampak, khususnya kekhawatiran yang diajukan oleh atau atas nama masyarakat yang terkena dampak.⁹⁶ Hal ini berarti membagikan informasi tentang penilaian (hak asasi manusia), strategi mitigasi dan kompensasi, serta informasi terkait perkembangan pelaksanaan strategi tersebut. Informasi ini biasanya diuraikan dalam berbagai dokumen, seperti Penilaian Hak Asasi Manusia, Rencana Rehabilitasi Mata Pencaharian, Laporan Pemantauan (antara lain), yang digabungkan ke dalam apa yang disebut dengan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus proyek yang diberlakukan Atradius terhadap kliennya untuk memperoleh asuransi.

Meskipun ada standar internasional, Atradius DSB telah berulang kali menolak untuk mempublikasikan informasi dari ESAP dengan alasan kerahasiaan bisnis. Oleh karena itu, mustahil bagi komunitas dan masyarakat luas untuk menilai validitas dan tanggapan terhadap

penilaian proyek, kelayakan langkah-langkah mitigasi dan kompensasi, atau mengevaluasi perkembangan pelaksanaannya. Sebaliknya, Keterbukaan Atradius DSB hanya terbatas pada satu kategori penilaian ex-ante, yaitu Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA). Sederhananya, masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki cara untuk mengetahui perjanjian apa yang dibuat oleh Atradius DSB dengan kliennya mengenai masalah yang memiliki konsekuensi langsung terhadap mata pencaharian, kesejahteraan, dan HAM mereka. Kurangnya transparansi secara keseluruhan lebih jauh diilustrasikan oleh fakta bahwa tidak ada satupun dari organisasi masyarakat sipil (CSO) atau masyarakat yang terkena dampak proyek dalam laporan ini mengetahui keterlibatan pemerintah Belanda melalui Badan Kredit Ekspornya. Informasi ini baru mereka ketahui melalui informasi yang dibagikan oleh LSM Belanda.

5.3 PENGARUH TIDAK PROPORSIONAL DARI KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMANTAUAN

Kurangnya keterbukaan dokumentasi proyek menggambarkan fakta bahwa kekuatan pengambilan keputusan dan informasi sepenuhnya dikontrol oleh mitra proyek, yang memiliki kepentingan pribadi (baik politik atau finansial) dalam proyek tersebut. Contohnya, proses uji tuntas dan aktifitas pemantauan ESAP umumnya dilakukan oleh konsultan yang dibayar oleh mitra proyek (seperti Atradius, pengeruk, pemilik proyek, dll.). Sebagian besar dokumentasi proyek yang dihasilkan oleh konsultan ini dimiliki oleh klien mereka dan dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan (NDA). Baik Boskalis maupun Van Oord tidak mengungkapkan informasi uji tuntas di tingkat proyek.

⁹⁵ Parlemen Belanda. Temuan dan Kesimpulan melaporkan tinjauan independen terhadap situasi keamanan proyek LNG Mozambik. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z03101&did=2023D07283

⁹⁶ Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

⁹⁷ Parlemen Belanda. Jawaban atas pertanyaan parlemen. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D21011>

⁹⁸ Frontline. https://www.npostart.nl/frontlinie/09-02-2023/VPWON_1346244; Global Witness. Runaway Risk. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/holding-corporates-account/runaway-risk/>

⁹⁹ Parlemen Belanda. Jawaban atas pertanyaan parlemen. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D14425>

¹⁰⁰ Parlemen Belanda. Temuan dan Kesimpulan melaporkan tinjauan independen terhadap situasi keamanan proyek LNG Mozambik. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z03101&did=2023D07283

¹⁰¹ Parlemen Belanda. Jawaban atas pertanyaan parlemen. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D21013>

¹⁰² Tempo. Warga: Reklamasi Centre Point of Indonesia Menggusur Nelayan. <https://nasional.tempo.co/read/765049/warga-reklamasi-centre-point-of-indonesia-menggusur-nelayan>; Tribun News Makassar. Residents Claim to Have Lost Their Livelihoods Due to CPI Reclamation Project. <https://makassar.tribunnews.com/2016/04/22/warga-mengakui-kehilangan-mata-pencaharian-akibat-reklamasi-proyek-cpi>

Atradius DSB dan Kementerian Keuangan secara aktif menolak seruan untuk penilaian yang independen dan diungkap ke publik. Contohnya, pada kasus **Bandara Internasional Manila Baru**, Organisasi Masyarakat Sipil dan anggota parlemen Belanda meminta Atradius DSB dan Kementerian Keuangan menugaskan Komisi Penilaian Lingkungan Belanda (NCEA) untuk menilai ESIA. NCEA, sebuah lembaga penilaian Belanda, yang dihormati secara internasional karena independensi dan ketelitiannya, hanya dapat melakukan penilaian jika diundang oleh otoritas pembuat keputusan. Atradius DSB dan Kementerian Keuangan menolak untuk memberikan izin penilaian kepada NCEA, dan mengklaim bahwa konsultan proyek cukup independen.⁹⁷ Pada tahun 2023, anggota parlemen Belanda meminta penilaian yang independen untuk kedua kalinya, setelah dirilisnya film dokumenter yang memberatkan dan laporan independen oleh Global Witness tentang pengembangan bandara.⁹⁸ Seperti permintaan pertama, Kementerian Keuangan kembali menolak.⁹⁹

Dari semua kasus yang dibahas dalam laporan ini, **kasus LNG Mozambik** adalah satu-satunya kasus yang benar-benar menjalani penilaian independen karena penolakan terus-menerus dari anggota parlemen, media dan masyarakat sipil. Laporan dari Proximities yang disebutkan di atas menyatakan bahwa konsultan Atradius DSB tidak cukup berkualifikasi dan independen untuk mengadakan penilaian dan pemantauan lingkungan dan sosial yang diperlukan. Proximities menyimpulkan bahwa Atradius DSB dan kementerian-kementerian Belanda yang bertanggung jawab perlu meningkatkan transparansi dan memanfaatkan pengetahuan lokal, serta memastikan independensi para ahli dan pihak lain yang terlibat dalam penilaian.¹⁰⁰ Belum jelas bagaimana rekomendasi tersebut diterapkan.

Konsentrasi dari kekuatan pengambilan keputusan di tangan aktor-aktor yang memiliki kepentingan pribadi, ditambah dengan kurangnya transparansi, memungkinkan terjadinya bias dan misrepresentasi yang tidak terkendali. Contohnya, pada tahun 2022, Kementerian Keuangan Belanda mengajukan surat kepada Parlemen Belanda mengenai **proyek bandara Teluk Manila**,¹⁰¹ mempertahankan keputusannya untuk memberikan asuransi. Surat tersebut memuat referensi mengenai kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh perwakilan dari Atradius DSB dan Kementerian Keuangan di lokasi proyek. Surat tersebut menyatakan bahwa pertemuan antara perwakilan dan juru bicara dari komunitas lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil telah mengonfirmasi bahwa proyek tersebut berada di jalur yang tepat untuk memenuhi standar CSR internasional. Ini merupakan hasil pertemuan yang sangat efektif. Akan tetapi apa yang sepenuhnya tidak disebutkan dalam surat tersebut adalah sejumlah stakeholder telah menyuarakan penolakan mendasar mereka terhadap proyek tersebut atas dasar dampak terhadap HAM dan lingkungan. Ketika perwakilan kementerian ditekan oleh Organisasi Masyarakat Sipil untuk membuktikan klaim mereka dengan catatan pertemuan, mereka mengakui bahwa tidak ada catatan yang dibuat, sehingga mustahil untuk melacak bagaimana klaim menyesatkan ini sampai ke dalam laporan resmi parlemen.



5.4 PENGABAIAN TERHADAP KONFLIK DAN KONTEKS HAM YANG LEBIH LUAS

Permasalahan besar lainnya yang menjadi pertentangan adalah pengabaian Atradius DSB dan pengeruk mengenai konteks hak asasi manusia dimana proyek-proyek yang diasuransikan terlaksana. Pada kasus **proyek Centre Point of Indonesia** di Makassar, lebih dari 40 keluarga digusur tanpa adanya kompensasi untuk memberi jalan bagi proyek tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kesaksian masyarakat lokal dan citra satelit.¹⁰² Namun demikian, Atradius DSB mengklaim bahwa penggusuran tersebut merupakan konsekuensi dari proyek berbeda yang tidak terkait. Dengan melakukan hal ini, Atradius DSB dapat menyangkal tanggung jawab apapun atas penggusuran tersebut atau kebutuhan untuk memberikan kompensasi kepada para korban yang sesuai dengan standar Internasional.

Demikian pula, **proyek bandara Teluk Manila** dan **proyek LNG Mozambik** disetujui dengan latar belakang meluasnya pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil, yang semuanya diketahui oleh Atradius DSB dan pengeruk. Proyek Teluk Manila dikaitkan dengan penahanan sewenang-wenang dan intimidasi oleh personel militer dan dilaporkan adanya pemindahan paksa 700 keluarga, banyak diantaranya menjadi sasaran intimidasi oleh personel militer. Semua kasus ini terjadi selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, yang bertanggung jawab atas ribuan eksekusi di luar hukum, yang menguatkan Filipina sebagai salah satu negara yang paling mematikan di Asia bagi para pembela lingkungan hidup.¹⁰³

Asuransi untuk proyek LNG diberikan dalam konteks pemberontakan kejam dan pengungsian internal di wilayah

Mozambik bagian utara. Situasi keamanan di wilayah ini sangat buruk sehingga staf Atradius DSB harus mengadakan kunjungan lokasi pada tahun 2019 dengan menggunakan helikopter, dan rompi anti peluru.¹⁰⁴ Namun demikian Atradius DSB dan pemerintah Belanda tidak hanya menganggap konteks hak asasi manusia 'dapat diterima', tetapi juga menyetujui asuransi hanya satu hari *setelah* adanya serangan brutal yang terjadi di dekat Palma. Serangan tersebut melibatkan pemenggalan kepala puluhan orang, termasuk pekerja proyek LNG, yang akhirnya memaksa TotalEnergies untuk menyatakan force majeure dan menarik stafnya dari lokasi konstruksi. Proyek tersebut telah ditangguhkan sejak tahun 2021, namun meskipun adanya serangan baru-baru ini TotalEnergies berencana untuk memulai kembali proyek ini pada tahun 2024.

5.5 KETERLIBATAN PUBLIK YANG TIDAK MEMADAI PADA TINGKAT LOKAL

Keterlibatan dengan stakeholder lokal merupakan komponen penting dalam melaksanakan uji tuntas, sebagaimana tercantum dalam pedoman OECD dan UNGP.¹⁰⁵ Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat yang terkena dampak, berdasarkan akses bebas dan awal mereka terhadap informasi proyek selama proses pelaksanaan proyek, sangat penting untuk memastikan hasil yang berkelanjutan dari proyek infrastruktur berskala besar.¹⁰⁶ Tidak ada proyek dalam laporan ini yang memenuhi standar ini.

Sebagai contoh, keterlibatan awal masyarakat untuk **proyek bandara Teluk Manila** berdasarkan pada representasi proyek yang tidak benar kepada masyarakat, dengan tidak menyebutkan tentang pengembangan

bandara, yang selanjutnya diikuti dengan intimidasi oleh personel militer terhadap masyarakat yang menjadi sasaran pemindahan.¹⁰⁷

Di Makassar, Boskalis dan pemilik proyek berjanji bahwa konsultasi yang tepat dengan stakeholder lokal akan dilakukan setelah menerima asuransi, namun konsultasi tersebut tidak pernah dilakukan. Pada kasus **Proyek Reklamasi Kota Pluit**, pengadilan memutuskan bahwa, bertentangan dengan hukum negara Indonesia, tidak ada partisipasi publik yang dilakukan selama penilaian resiko lingkungan. Yang membuat komunitas nelayan kecewa adalah, keputusan ini dibatalkan karena alasan teknis oleh pengadilan banding, yang mengabaikan pengaduan prosedural dan substantif dari masyarakat yang terkena dampak. Konsultasi publik terkait dampak lingkungan proyek **Gulhifalhu di Maladewa** sangat terbatas: input untuk EIA dikumpulkan secara eksklusif melalui formulir online yang dibuka selama periode lima hari selama lockdown Covid-19 dan hanya menghasilkan masukan dari tujuh responden.¹⁰⁸

Keterlibatan publik tidak hanya tanggung jawab dari otoritas lokal, tetapi juga perusahaan multinasional seperti Boskalis dan Van Oord, serta Atradius DSB, yang sebagai anak perusahaan Atradius NV, juga terikat oleh pedoman OECD.¹⁰⁹ Namun kenyataannya, perusahaan pengerukan sering kali mengabaikan standar tersebut dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada klien mereka. Pada kasus **proyek pelabuhan Suape**, masyarakat memberikan kesaksian bahwa operasi pengerukan dimulai tanpa adanya peringatan sebelumnya, dan bahkan mereka tidak mengetahui nama perusahaan yang terlibat (Van Oord). Demikian pula, di **Filipina**, Boskalis menolak untuk bertemu dengan organisasi Filipina yang ikut menulis surat keprihatinan terkait **proyek Teluk Manila**, yang

¹⁰³ Global Witness. Berdiri kokoh. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/>

¹⁰⁴ Both ENDS. Surat untuk Mentri Kaag. https://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/210511_Brief_Mozambique_verzekering_Kaag-1.pdf

¹⁰⁵ OECD Watch. Pedoman OECD dan keterlibatan stakeholder. <https://www.oecdwatch.org/oecd-ncps/the-oecd-guidelines-for-mnes/what-is-in-the-oecd-guidelines/the-oecd-guidelines-and-stakeholder-engagement/>

¹⁰⁶ Komisaris Tinggi Kantor Hak Asasi Manusia PBB & Henrich Boll Stiftung. Kesenjangan Infrastruktur Lainnya: Keberlanjutan. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/TheOtherInfrastructureGap_FullLength.pdf

¹⁰⁷ Global Witness. Risiko Landasan Pacu. https://www.globalwitness.org/documents/20477/Runaway_Risk_-_February_2023.pdf

¹⁰⁸ Perkiraan populasi di wilayah Greater Male adalah lebih dari 200.000 (data perkiraan populasi, Biro Statistik Maladewa). EIA yang dihasilkan adalah dokumen teknis setebal 677 halaman, tersedia hanya dalam Bahasa Inggris.

¹⁰⁹ NCP Belanda. Pernyataan Terakhir Suape. <https://www.oecdguidelines.nl/binaries/oecd-guidelines/documenten/publication/2016/11/30/final-statement-notification-both-ends-forum-suape-vs-atradius-dsb/161130-Final+statement+Dutch+NCP+-+Both+ENDS+et+al.+vs.+ADSB.pdf>

¹¹⁰ NCP Belanda. Pernyataan Terakhir Suape. <https://www.oecdguidelines.nl/binaries/oecd-guidelines/documenten/publication/2016/11/30/final-statement-notification-both-ends-forum-suape-vs-atradius-dsb/161130-Final+statement+Dutch+NCP+-+Both+ENDS+et+al.+vs.+ADSB.pdf>

berpendapat bahwa pemilik proyek, San Miguel Corporation, memimpin keterlibatan stakeholder yang berhubungan dengan proyek tersebut. Dengan demikian, perusahaan tersebut mengabaikan tanggung jawabnya sendiri atas dampak dari operasi bisnisnya. Lebih buruk lagi, CEO Boskalis kemudian memberikan klaim yang tidak benar, di depan umum, bahwa Organisasi Masyarakat Sipil Filipina Kalikasan-PNE, salah satu penulis surat keprihatinan tersebut, telah menolak tawaran dari Boskalis untuk terlibat dalam dialog.

Pada tahun 2015, Both ENDS dan Forum Suape mengajukan sebuah pengaduan kepada Titik Kontak Nasional (NCP) Belanda mengenai pedoman OECD yang menuding kegagalan Atradius DSB dan Van Oord untuk mematuhi pedoman OECD sehubungan dengan **kasus Suape**. NCP memutuskan bahwa kedua pihak 'harusnya melakukan pekerjaan yang lebih baik' dalam uji tuntas mereka, termasuk konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.¹¹⁰ Mengikuti rekomendasi dari NCP, Atradius DSB menetapkan prosedur pengaduannya sendiri. Akan tetapi, mekanisme ini terbukti sangat memakan waktu dan tidak efektif.¹¹¹ Pada bulan November 2019, WALHI dan Both ENDS mengajukan sebuah pengaduan kepada Atradius DSB sehubungan dengan **kasus CPI Makassar**. Setelah lebih dari empat tahun, prosesnya masih terus berjalan.

5.6 PENYIMPANGAN HUKUM DAN KORUPSI

Sebagai bagian dari proses uji tuntas keuangan, Atradius DSB diharuskan untuk menilai resiko korupsi yang terkait dengan proyek. Pada tahun 2022, pemerintah Belanda menugaskan penilaian langkah-langkah anti-korupsi Atradius DSB, dan menemukan bahwa prosedur uji tuntas keuangannya tidak memadai, sehingga

dukungan finansialnya rentan terhadap korupsi.¹¹² Tidak mengherankan, beberapa proyek pengerukan yang diasuransikan telah dikaitkan dengan korupsi dan penyimpangan hukum atau keuangan yang meragukan. Presiden Direktur **proyek Reklamasi Kota Pluit di Indonesia** dihukum karena kasus suap yang terkait dengan proyek tersebut dan dipenjara selama tiga tahun, sementara seorang anggota parlemen daerah dipenjara selama tujuh tahun.¹¹³ Tahap pertama dari **proyek pelabuhan Gulhifalhu di Maladewa** diberikan secara langsung kepada Boskalis tanpa melalui proses tender, yang memicu kemarahan publik dan investigasi oleh komisi anti-korupsi Maladewa, yang saat ini masih berjalan.¹¹⁴

Sehubungan dengan **proyek Teluk Manila**, para ahli hukum berpendapat bahwa sebagian besar lahan dikategorikan sebagai lahan publik dan tidak dapat dicabut, yang berarti lahan tersebut tidak dapat diperoleh untuk pengembangan NMIA pada dasarnya.¹¹⁵ Di **Maladewa**, konsesi penambangan pasir untuk **proyek pelabuhan Gulhifalhu** ditemukan melanggar hukum perlindungan lingkungan hidup karena lokasinya dekat dengan Kawasan Konservasi Laut atau Marine Protected Area (MPA). Namun, alih alih merelokasi proyek tersebut atau lokasi konsesi, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Maladewa justru mengubah batas-batas KKL agar memungkinkan penambangan pasir untuk terus berjalan.¹¹⁶

Di Mozambik, penemuan cadangan gas yang besar dapat dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang terjadi pada tahun 2013.¹¹⁷ Hal ini melibatkan pinjaman rahasia yang dibuat oleh pejabat yang sebagian dimaksudkan untuk melindungi cadangan gas. Skandal tersebut menyebabkan IMF dan lembaga donor internasional, termasuk Belanda,

menarik dukungan keuangan langsung kepada Mozambik pada tahun 2016, sehingga memicu krisis ekonomi.

5.7 PERUBAHAN YANG TIDAK MEMADAI PADA KEBIJAKAN UJI TUNTAS ATRADIUS DSB

Selama bertahun-tahun, organisasi masyarakat sipil, termasuk para penulis, telah meminta pemerintah Belanda untuk mempertajam kebijakan uji tuntas Atradius DSB dan memastikan keselarasan dengan standar internasional. Dalam menanggapi tekanan ini hanya perbaikan kecil yang dilakukan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2015, Both ENDS dan Forum Suape mengajukan pengaduan kepada Dutch NCP terkait pedoman OECD sehubungan dengan **kasus Suape**. Mengikuti rekomendasi NCP, Atradius DSB menetapkan prosedur pengaduan internalnya sendiri pada tahun 2018. Pada tahun 2020 dan 2023, Atradius DSB dan kementerian yang bertanggung jawab memutuskan untuk menyaring semua permohonan dukungan ECA, serta mengunjungi dan memantau seluruh proyek kategori A (proyek dengan resiko sosial dan lingkungan yang tinggi).

Meskipun hal ini merupakan perbaikan yang baik, namun masih jauh dari apa yang sebenarnya diperlukan untuk memastikan proses uji tuntas yang kuat, transparan, dan akuntabel. Sebagai contoh, prosedur pengaduan terbukti sangat memakan waktu dan tidak efektif.¹¹⁸ Pada bulan November tahun 2019, WALHI dan Both ENDS mengajukan sebuah pengaduan kepada Atradius DSB sehubungan dengan **kasus CPI Makassar**. Setelah lebih dari empat tahun, belum ada resolusi: prosedur pengaduan ini masih berjalan. Mengenai kunjungan lokasi yang diperlukan, tanpa adanya pengecekan dan keseimbangan tambahan, masih harus dilihat apakah

kunjungan ini akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terkena dampak. Sebagaimana dibahas sebelumnya, satu kunjungan serupa ke lokasi proyek **Bandara Manila** digunakan untuk mengarang gambaran persetujuan di antara juru bicara lokal terhadap parlemen Belanda. Pada kasus proyek **LNG Mozambik**, kunjungan dilakukan menggunakan helikopter dengan rompi anti peluru, namun bagi orang-orang yang berada di lapangan resiko hak asasi manusia dari proyek tersebut dianggap tidak dapat diterima.

Pada bulan April 2023, Atradius DSB meluncurkan konsultasi publik pada

kebijakan uji tuntasnya, akan tetapi konsultasi tersebut diumumkan hanya dalam Bahasa Belanda. Sebagai hasil dari penjangkauan oleh Both ENDS dan Milieudefensie kepada Organisasi Masyarakat Sipil lainnya, sebuah koalisi dari tiga belas organisasi sosial dari Belanda dan luar negeri memberikan tanggapan.¹¹⁹ Namun, hampir tidak ada rekomendasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang diterima, termasuk rekomendasi untuk mengadopsi kebijakan gender dan transparansi yang lebih baik. Perubahan kebijakan Atradius DSB gagal dalam menghasilkan perubahan struktural yang sejalan dengan standar internasional.

- 111 Atradius DSB. Masukan dan Keluhan. <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/article/feedback-and-complaints.html>
- 112 Tinjauan Kebijakan Anti Suap untuk asuransi kredit ekspor. <https://open.overheid.nl/repository/ronl-cc3f00a4346a19036167a38b2aaad78c4f9a3db4/1/pdf/rapportage-pic.pdf>
- 113 Sanusi mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara dalam kasus suap reklamasi. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/30/sanusi-gets-seven-years-reclamation-bribery-case.html>
- 114 The Edition. ACC selidiki penyerahan proyek Gulhifalhu oleh pemerintah tanpa penawaran. <https://edition.mv/news/13130>
- 115 Rappler. Aetropolis meningkatkan risiko bencana untuk masyarakat Bulacan. <https://www.rappler.com/environment/aetropolis-airport-heightens-disaster-risks-communities-bulacan/>
- 116 'Zona penyangga telah direvisi menjadi sekitar 23 meter ke utara dan sekitar 120 meter ke timur dan barat dari "Area Inti" yang ditetapkan. Dapat dipahami bahwa informasi ini sedang dalam proses untuk diumumkan.' EIA untuk pekerjaan pengerukan yang diusulkan, reklamasi tanah, dan perbaikan di Gulhifalhu, CDE Consulting, Maladewa April 2020, halaman.85. Dalam hal aktifitas pengerukan, Maladewa memiliki uji tuntas dan penerapan hukum yang sangat buruk mengenai MPA. Proyek pengerukan pemerintah Maladewa dengan Van Oord di Addu Atoll menempatkan beberapa MPA dalam bahaya, termasuk lokasi bangkai kapal Perang Dunia II dan tempat pembersihan Manta Ray di mana ikan pari besar terlihat sepanjang tahun.
- 117 Friends of the Earth Europe and Justica Ambiental. Memicu Krisis di Mozambik. <https://www.foei.org/wp-content/uploads/2022/05/Fuelling-the-Crisis-in-Mozambique-FOEE-JA-report.pdf>



Nelayan di Cavite, Teluk Manila. Kredit foto: Both ENDS

ARGUMEN YANG CACAT TERHADAP DUKUNGAN ECA BELANDA PADA PROYEK-PROYEK YANG MERUSAK SECARA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Selama dua belas tahun bekerja bersama dengan komunitas terkait proyek pengerukan kontroversial yang didukung oleh asuransi kredit ekspor Atradius DSB, sejumlah argumen yang cacat secara rutin dikemukakan untuk membenarkan keterlibatan Belanda dalam proyek-proyek ini. Di bawah ini kami menanggapi argumen tersebut:

1. Keterlibatan Belanda menjamin bahwa perlindungan sosial dan lingkungan diterapkan secara maksimal

Aktor-aktor Belanda sering mengklaim bahwa keterlibatan mereka mengarah pada penerapan ketat perlindungan sosial dan lingkungan. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, klaim ini tidak berdasar. Keterlibatan Belanda belum mampu untuk melindungi masyarakat dan ekosistem dari kerusakan yang tidak dapat diterima. Selain itu, Atradius DSB, Boskalis, dan Van Oord, menolak untuk membuka secara publik informasi yang memadai bagi masyarakat sipil dan komunitas untuk mengevaluasi atau memantau dampak buruk terhadap hak asasi manusia, sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kerangka internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab.¹²⁰ Penelitian independen juga menunjukkan bahwa Atradius DSB kurang memiliki keahlian dan mandat untuk menilai resiko keamanan, dan bahwa konsultannya tidak selalu independen.¹²¹

2. Pemilik proyek bertanggung jawab atas keterbukaan informasi sosial dan lingkungan, bukan pengeruk ataupun Atradius DSB

Aktor Belanda seringkali berpendapat bahwa keterbukaan publik mengenai informasi sosial dan lingkungan yang relevan, seperti Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial, tergantung pada kebijaksanaan pemilik proyek, dan bahwa Atradius DSB dan pengeruk Belanda tidak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi tersebut. Argumen ini tidak memiliki dasar dalam standar internasional, yang berlaku pada seluruh perusahaan multinasional berdasarkan pada sejauh mana operasi bisnis mereka menyebabkan, berkontribusi, atau terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

3. Aktor Belanda secara kontrak dibatasi untuk mengeluarkan informasi sosial dan lingkungan yang relevan secara publik.

Sebagai lanjutan dari argumen sebelumnya, Aktor-aktor Belanda berulang kali mengklaim bahwa informasi sosial dan lingkungan yang relevan, seperti Rencana Aksi Sosial dan Lingkungan, adalah pengetahuan milik pemilik proyek dan bahwa mereka dibatasi secara kontrak untuk membagikannya secara publik. Praktik ini pada dasarnya

bertentangan dengan standar internasional karena (tampaknya) melepaskan mereka dari tanggung jawab untuk membuka informasi sosial dan lingkungan yang relevan mengenai dampak dari operasi bisnis mereka.

4. Proyek pengerukan yang didukung oleh ECA menghasilkan pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan pada wilayah tuan rumah

Proyek pengerukan dalam laporan ini terdiri dari pengembangan real estate, pengembangan pelabuhan, infrastruktur bahan bakar fosil, dan bandara besar yang memiliki sedikit hingga tidak ada manfaat langsung terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan yang terkena dampaknya. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh proyek-proyek dalam laporan ini, masyarakat-masyarakat ini menanggung dampak buruk yang paling besar, termasuk rusaknya perekonomian lokal, mata pencaharian, dan ketahanan pangan, sementara peluang kerja cenderung terbatas pada pekerjaan sementara, yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak memberikan upah yang baik. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan di beberapa kasus, proyek-proyek ini seringkali disertai dengan meningkatnya militerisasi, intimidasi, dan kekerasan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat.

5. Jika pengeruk Belanda tidak melakukan, maka pengeruk Cina yang akan melakukannya

Ancaman atas persaingan Tiongkok seringkali muncul untuk membenarkan keterlibatan Belanda dalam proyek pengerukan yang merusak. Satu argumen yang umum adalah perusahaan Tiongkok kurang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan Belanda. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus dalam laporan ini, tidak ada dasar dalam argumen ini. Proyek pengerukan yang di dukung oleh ECA Belanda telah secara sistematis dikaitkan dengan pelanggaran HAM, dan kerusakan sosial dan lingkungan. Kedua, yang kontradiktif, argumen yang memunculkan persaingan Tiongkok untuk menentang standar uji tuntas yang lebih ketat bagi pengeruk Belanda, adalah agar tidak merusak daya saing internasional mereka. Di kedua argumen ini, peran pengeruk Tiongkok terluar dilebih-lebihkan. Pengeruk Belanda, bersama dengan pengeruk Belgia, mendominasi 95% dari pasar pengerukan terbuka.¹²² Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk berbicara mengenai persaingan antara pengeruk Belanda dan Belgia. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini terikat dengan kerangka kerja internasional yang sama atas perilaku bisnis yang bertanggung jawab sebenarnya menyediakan kesempatan yang langka untuk mendorong persaingan untuk menjadi yang teratas dalam sektor pengerukan global.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan ini menunjukkan bagaimana Atradius Dutch State Business, melalui dukungannya kepada pengeruk Belanda Boskalis dan Van Oord, terkait dengan dampak sosial, lingkungan, dan HAM yang serius. Kasus-kasus yang digambarkan mencerminkan lebih dari satu dekade kerja keras kelompok lingkungan hidup dan HAM, yang dengan tekun memantau rencana dan proyek pengerukan, bekerja sama dengan komunitas lokal yang terdampak untuk melakukan advokasi atas hak-hak mereka.

Ketujuh kasus mengungkapkan tiga ciri sistemik proyek pengerukan yang didukung oleh ECA:

- **Pengusuran paksa masyarakat secara luas, represi, hilangnya mata pencaharian dan kerusakan ekosistem**

Proyek-proyek yang diuraikan dalam laporan ini telah dikaitkan, pada tingkat yang beragam, dengan pengusuran keluarga dan mata pencaharian mereka, perusakan rumah dan pemukiman kembali secara paksa, dampak yang berkaitan dengan gender, hilangnya habitat laut dan pesisir serta pusat keanekaragaman hayati. Dinamika ini semakin memperburuk kerentanan masyarakat terhadap iklim serta mengurangi kapasitas alami ekosistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Selain itu, sebagian besar dari proyek-proyek ini dikaitkan dengan meningkatnya kekerasan yang sewenang-wenang dan/atau intimidasi terhadap komunitas dan pembela hak asasi

manusia di bidang lingkungan hidup. Pada proyek-proyek tertentu, asuransi diberikan dalam konteks konflik bersenjata dan penindasan dengan kekerasan.

- **Pengelolaan proyek didominasi oleh kepentingan pribadi dan tidak responsif, akuntabel dan transparan terhadap masyarakat yang terkena dampak.**

Kekuatan pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi dikendalikan oleh para aktor yang memiliki kepentingan politik atau keuangan dalam proyek tersebut, yang biasanya cenderung menampilkan citra positif proyek tersebut kepada masyarakat luas. Masyarakat yang terdampak tidak memiliki pengaruh resmi terhadap hasil dari proyek ataupun akses terhadap informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga secara efektif membuat mereka tidak berdaya. Aktor-aktor Belanda tidak bersedia memberikan akses publik yang penuh terhadap informasi mengenai dampak proyek, kompensasi dan langkah-langkah mitigasi, serta pemantauan.

- **Konteks peraturan proyek pengerukan yang didukung oleh ECA Belanda sangat tidak memadai dan melemahkan kewajiban Belanda berdasarkan kerangka uji tuntas perusahaan internasional, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan**

118 Atradius DSB. Masukan dan Keluhan. <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/article/feedback-and-complaints.html>

119 Both ENDS. Surat dari LSM untuk badan kredit ekspor Belanda: Kebijakan CSR harus diperkuat. <https://www.bothends.org/en/Whats-new/Letters/Letter-from-NGOs-to-Dutch-export-credit-agency-CSR-policy-must-be-strengthened/>

120 Contohnya, Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial untuk proyek LNG Mozambik tidak dibuka.

121 Parlemen Belanda. Temuan dan Kesimpulan melaporkan tinjauan independen terhadap situasi keamanan proyek LNG Mozambik. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z03101&did=2023D07283

122 Pasir laut: Meletakkan pasir pada agenda keberlanjutan laut. Laporan Aliansi Aksi Risiko dan Ketahanan Laut (ORRAA). https://www.researchgate.net/publication/371541012_Ocean_Sand_Putting_sand_on_the_ocean_sustainability_agenda

123 UNEP. Pasir dan Keberlanjutan: 10 rekomendasi strategis untuk menghindari sebuah krisis. <https://www.unep.org/resources/report/sand-and-sustainability-10-strategic-recommendations-avert-crisis>. <https://www.unep.org/resources/report/sand-and-sustainability-10-strategic-recommendations-avert-crisis>

Kedua kesimpulan diatas menunjukkan konteks peraturan proyek pengerukan yang didukung oleh ECA Belanda tidak sesuai dengan tujuannya untuk mencegah dampak sosial, lingkungan, dan HAM yang tidak dapat diterima. Hal ini mengacu pada ketidaksesuaian kebijakan yang signifikan antara kebijakan asuransi kredit ekspor di satu sisi dan komitmen Belanda terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan di sisi lain. Temuan ini sejalan dengan seruan baru-baru ini dari Program Lingkungan Hidup PBB untuk peraturan yang lebih ketat pada sektor pengerukan.¹²³



REKOMENDASI

Laporan ini terutama ditujukan kepada pemerintah Belanda dan membahas cara mereka memanfaatkan sumber daya negara untuk memajukan kepentingan perusahaan pengerukan multinasional Belanda dengan mengorbankan masyarakat dan ekosistem, dan bertentangan dengan kewajiban internasional tentang hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Karena sifat sistemik dari dampak buruk dan pengabaian yang digambarkan dalam laporan ini, kami menyediakan rekomendasi yang mendesak kepada pemerintah Belanda untuk memastikan keselarasan penuh kebijakan ekspor Belanda dengan komitmennya dalam memajukan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kerangka kerja internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Pesan-pesan utama untuk pembuat kebijakan Belanda:

- Menarik asuransi kredit ekspor pada proyek-proyek yang digambarkan dalam laporan ini yang saat ini sedang berjalan: Proyek LNG Mozambik, Bandara Internasional Manila Baru, dan pelabuhan Gulhifalhu.
- Memastikan keselarasan dengan pedoman OECD, Prinsip Panduan PBB, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kungmin-Montreal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dengan mengambil langkah-langkah kebijakan berikut:
 - Menjamin keterbukaan publik yang tepat waktu terhadap dokumentasi sosial, lingkungan dan HAM yang relevan dari proyek-proyek yang diasuransikan. Mendefinisikan kerahasiaan bisnis dengan cara yang terbatas, hanya pada pengecualian-pengecualian yang didefinisikan dengan baik. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif di seluruh tahapan proyek, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan dan marginal.
- Meningkatkan kebijakan gender untuk menilai dan mengelola dampak buruk yang khusus terkait dengan gender.
- Mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi pembela HAM dalam bidang lingkungan hidup terhadap pembalasan.
- Memastikan bahwa proyek-proyek yang berjalan tidak memberikan dampak buruk terhadap jaminan keamanan masyarakat baik di darat maupun di laut.
- Menyertakan ketentuan dalam asuransi kredit ekspor yang memungkinkan pencabutan asuransi lebih mudah jika standar sosial, lingkungan, dan HAM tidak terpenuhi.
- Menolak permintaan dukungan kredit ekspor pada proyek-proyek yang direncanakan akan dilakukan di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk ekosistem dengan integritas ekologi yang tinggi.
- Menolak permintaan dukungan kredit ekspor pada proyek-proyek yang telah terkait dengan pelanggaran HAM atau perusakan lingkungan secara ilegal.

BAB 7

TANGGAPAN DARI STAKEHOLDER BELANDA TERHADAP LAPORAN INI

Atradius DSB, Boskalis, Van Oord, dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Belanda telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap draft akhir laporan ini.

Boskalis tidak menanggapi undangan kami untuk menyertakan reaksi atas laporan ini.

Van Oord mengindikasikan bahwa pihaknya tidak mengakui dirinya dalam laporan ini dan oleh karena itu “tidak ingin dan tidak dapat menanggapi fakta dan tuduhan dalam laporan ini.” sebagai latar belakang (dan bukan untuk tujuan publikasi) Van Oord telah mengirimkan email dengan penjelasan singkat mengenai konteks tersebut)

Atradius DSB dan kementerian menanggapi:

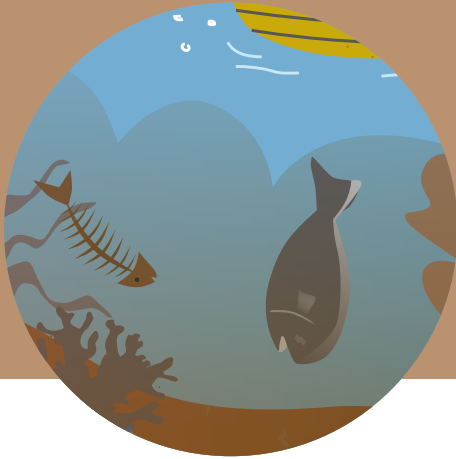
“Kami tidak mengakui diri kami dalam kesimpulan laporan ini”. Kami menghargai dialog konstruktif dengan masyarakat sipil. Di berbagai waktu di masa lalu kami telah melakukan pembicaraan dengan anda dan pihak lainnya dari masyarakat sipil mengenai proyek pengerukan yang anda sebutkan, dimana kami juga telah menjelaskan pandangan kami mengenai proyek-proyek ini. Untuk hal ini kami juga mengacu pada berbagai surat parlemen, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan parlemen, dan perdebatan parlemen mengenai penerapan asuransi ekspor dan proyek-proyek ini pada khususnya.

Sesuai dengan kebijakannya, Atradius Dutch State Business (DSB) menilai seluruh permohonan asuransi untuk risiko lingkungan dan sosial untuk mencegah partisipasi dalam proyek yang memiliki dampak yang tidak dapat diterima terhadap manusia, hewan atau lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional. Evaluasi independen terhadap kebijakan Sosial dan Lingkungan (E&S) Atradius DSB menegaskan bahwa hal ini telah diterapkan dengan benar dan efektif untuk mencegah transaksi dengan risiko yang tidak dapat diterima terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi independen ini juga menemukan bahwa Belanda telah melampaui apa yang disyaratkan berdasarkan standar internasional E&S.

Sebagai contoh, Atradius DSB menyaring seluruh aplikasi terkait risiko lingkungan dan sosial, sementara hal ini tidak diwajibkan dalam pendekatan umum OECD.

Proyek-proyek pengerukan berskala besar melaksanakan uji tuntas yang ekstensif, termasuk kunjungan lokasi, di mana masukan dari LSM (lokal) juga disertakan. Selain itu, sejak tanggal 1 Januari 2022, proyek yang berada dalam kategori risiko tertinggi (di mana proyek pengerukan internasional biasanya dikategorikan) dipantau aspek sosial dan lingkungannya setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Kami juga menghargai pentingnya transparansi dan komunikasi dengan stakeholder lokal. Pemerintah Belanda berkomitmen terhadap hal ini. Kami melakukannya melalui dialog dengan pemilik proyek dan eksportir, sejalan dengan Pendekatan Umum OECD dan mempertimbangkan perjanjian yang ada mengenai kerahasiaan bisnis. Kebijakan transparansi Atradius DSB relevan dalam konteks ini dan bertujuan untuk membuat informasi mengenai proyek, termasuk laporan dampak lingkungan dan sosial, tersedia untuk publik terlebih dahulu. Di antara hal lainnya, hal ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan selama tahap penilaian dari suatu proyek. Selain itu, sesuai dengan kebijakan transparansi, Atradius DSB mempublikasikan rangkuman penilaiannya pada proyek kategori A dan B (risiko sosial dan lingkungan yang tinggi) per 1 Januari, 2023.

Secara keseluruhan, kami tidak mengakui kritik bahwa Kebijakan E&S dan transparansi tidak memadai dan oleh karena itu kami melihat tidak ada alasan untuk menarik asuransi ekspor dari proyek-proyek pengerukan yang disebutkan di atas. Sehubungan dengan proyek LNG Mozambik, belum ada keputusan yang diambil terkait partisipasi dalam kemungkinan dimulainya kembali proyek tersebut. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kami menghargai dialog konstruktif dengan masyarakat sipil. Informasi dikumpulkan secara proaktif dan seluas mungkin, termasuk dari LSM lokal. Hal ini juga serupa dengan proyek-proyek yang disebutkan dalam laporan ini. Sejalan dengan ini, kami terbuka untuk membahas temuan dari laporan tersebut dengan anda.”



Kerusakan Pengerukan

Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan pada proyek pengerukan internasional yang diangsuransikan oleh Pemerintah Belanda